

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(TAHUN ANGGARAN 2016)**

(Studi Pada Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

DEARISTA MAYASHELA

NIM. 145030107111026



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

“ Don ’t compare your life to others. There ’s no comparison between the sun and the moon. They shine when it ’s their time ”
(unknown)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat (Tahun Anggaran 2016)
(Studi Pada Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare
Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Dearista Mayashela

NIM : 145030107111026

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 3 Juli 2018

Komisi Pembimbing,



Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., MMG
NIP. 19810601 200501 1 005

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Juli 2018
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Dearista Mayashela
Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Tahun Anggaran 2016) (Studi Pada Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., MMG
NIP. 19810601 200501 1 005



Fadillah Putra, M.Si., MPAff., Ph.D
NIP. 19740627 200312 1 001

Anggota



Andhyka Muttaqin, S.AP., M.AP
NIP. 2011078504211001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 3 Juli 2018

Mahasiswa



Dearista Mayashela
145030107111026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini, saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya, Bapak Heri Wibisono dan Ibu Sulihati. Keduanya yang selalu bekerja keras dan selalu ada dalam berbagai kondisi serta selalu mendoakan yang terbaik untuk saya dunia akhirat. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya sebagai wujud pertanggungjawaban saya bahwa saya telah menyelesaikan tugas dan kepercayaan yang mereka berikan kepada saya selama empat tahun terakhir untuk mencari ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

RINGKASAN

Dearista Mayashela, 2018. **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Tahun Anggaran 2016) (Studi Pada Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., M.A. 154 halaman + xviii

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri serta sebagai bentuk bantuan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong pembiayaan program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Desa Arjowilangun adalah salah satu desa di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2016 dan mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun telah dilaksanakan dengan baik karena dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Faktor pendukung keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun adalah adanya peraturan yang jelas serta sarana-prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Pemberdayaan Masyarakat

SUMMARY

Dearista Mayashela, 2018. **Management of Village Fund Allocation (ADD) Based on Community Empowerment (Fiscal Year 2016) (Study on Arjowilangun Village, Kalipare Sub-district, Malang Regency).** Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University. Advisor Lecturer : Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., M.A. 154 pages + xviii

Village Fund Allocation (ADD) is a manifestation of the fulfillment village rights to implement its own autonomy and as a form of assistance from Local Government to encourage the financing of village government programs in carrying out government activities and community empowerment. The village of Arjowilangun is one of the villages in Kalipare Sub-district, Malang Regency that received the Village Fund Allocation (ADD) in 2016 and managed the Village Fund Allocation (ADD) with community-based empowerment.

This research uses quantitative research methods that aim to describe the management of Village Fund Allocation (ADD) based on community empowerment in Arjowilangun Village, Kalipare Sub-district, Malang Regency and factors support and inhibit the management of Village Fund Allocation (ADD). Data collection techniques used are interview, observation, and documentation. Data analysis technique is done by data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of this study indicate that the management of Village Fund Allocation (ADD) based on community empowerment in Arjowilangun Village has been well implemented because in its implementation is based on Regulation of Malang Regent Number 35 Year 2017 about Third Amendment Regulation of Malang Regent Number 21 Year 2015 about Guidance of Fund Allocation Management Village (ADD). Factors supporting the successful management of Village Fund Allocation (ADD) based on community empowerment in Arjowilangun Village are the existence of clear rules and adequate facilities. While the inhibiting factors are less competent Human Resources and the preparation of accountability reports are not on time.

Keywords: Village Fund Allocation (ADD), Community Empowerment

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Tahun Anggaran 2016) (Studi Pada Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

4. Bapak Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, kritik, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
6. Pemerintah Desa Arjowilangun yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, serta berkenan mengarahkan dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Heri Wibisono dan Ibu Sulihati, yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis
8. Firmananda Utama Akbar, yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat-sahabat tersayang (Widia Rachmania Aditya, Ayang Della Egidia, Nur Fauziah Aulia), serta teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang senantiasa mengingatkan, memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Administrasi Publik	20
1. Pengertian Administrasi	20
2. Pengertian Publik	20
3. Pengertian Administrasi Publik	21
C. Administrasi Desa	22
1. Konsep Desa	22
2. Otonomi Desa	23
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	24

4. Keuangan Desa	26
D. Alokasi Dana Desa (ADD)	30
1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)	30
2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)	31
3. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)	33
4. Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	33
5. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	36
E. Pemberdayaan Masyarakat	43
1. Konsep Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat	43
2. Bias dalam Pemberdayaan Masyarakat	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Fokus Penelitian	52
C. Lokasi dan Situs Penelitian	53
D. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Instrumen Penelitian	57
G. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	61
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang	61
2. Gambaran Umum Kecamatan Kalipare	64
3. Gambaran Umum Desa Arjowilangun	66
a. Kondisi Geografis	66
b. Kondisi Demografis	67
c. Pemerintahan Desa Arjowilangun.....	68
B. Penyajian Data	77
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis Pemberdayaan Masyarakat	77
a. Pengelolaan ADD di Desa Arjowilangun	81
1). Perencanaan ADD Desa Arjowilangun	81
2). Pencairan dan Penyaluran ADD Desa Arjowilangun	85

3). Pelaksanaan ADD Desa Arjowilangun	88
4). Pembinaan dan Pengawasan ADD Desa Arjowilangun	91
5). Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD Desa Arjowilangun	92
b. Hasil Pemberdayaan Masyarakat di Desa Arjowilangun	97
1). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	98
2). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	108
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan ADD di Desa Arjowilangun	124
a. Faktor Pendukung Pengelolaan ADD	124
b. Faktor Penghambat Pengelolaan ADD	128
C. Analisis Data	131
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis Pemberdayaan Masyarakat	131
a. Pengelolaan ADD di Desa Arjowilangun	132
1). Perencanaan ADD Desa Arjowilangun	132
2). Pencairan dan Penyaluran ADD Desa Arjowilangun	134
3). Pelaksanaan ADD Desa Arjowilangun	138
4). Pembinaan dan Pengawasan ADD Desa Arjowilangun	140
5). Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD Desa Arjowilangun	141
b. Hasil Pemberdayaan Masyarakat di Desa Arjowilangun	143
1). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	143
2). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	145
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan ADD di Desa Arjowilangun	146
a. Faktor Pendukung Pengelolaan ADD	146
b. Faktor Penghambat Pengelolaan ADD	148
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151

B. Saran	153
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



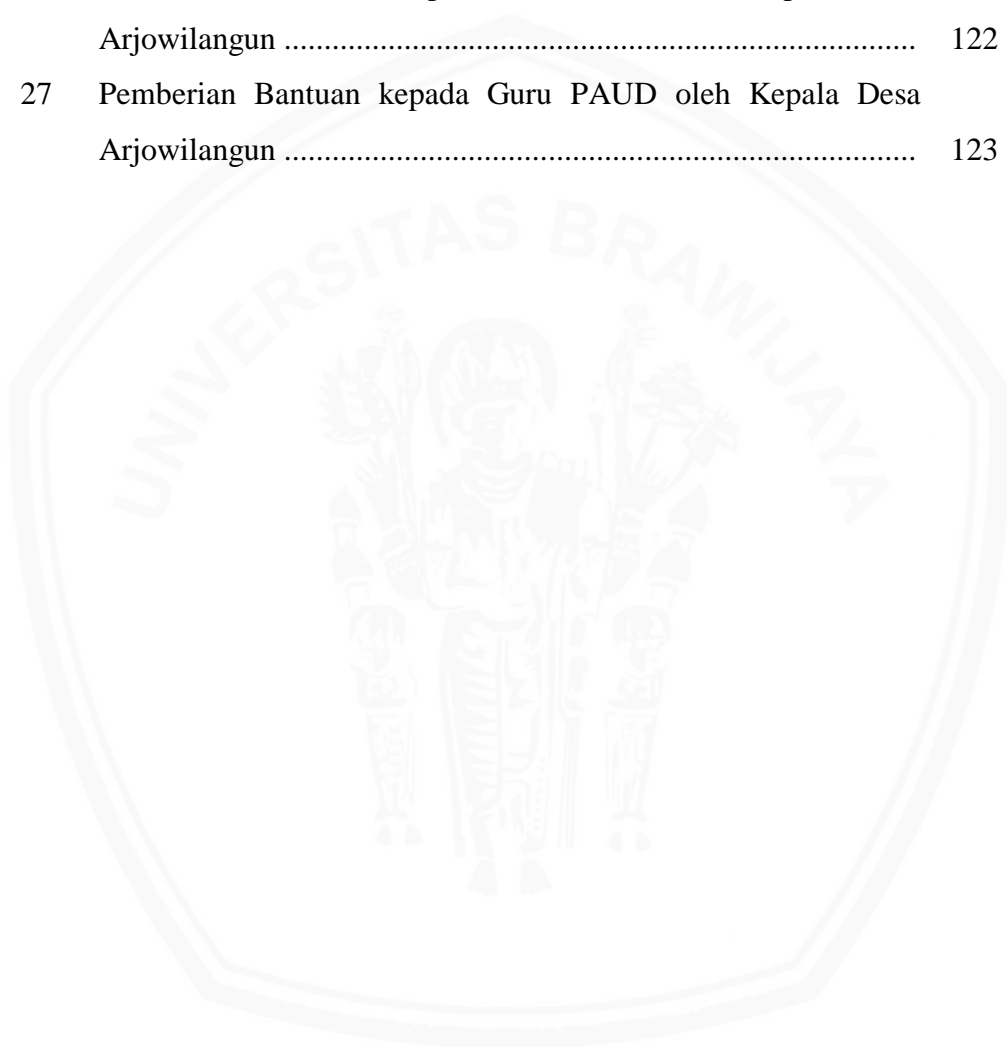
DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Penelitian Terdahulu	15
2	Uraian Singkat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun	78
3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes per Sumber Dana Desa Arjowilangun Tahun Anggaran 2016	95
4	Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	99
5	Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Masyarakat	102
6	Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa	107
7	Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	109
8	Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	112
9	Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	114
10	Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pembinaan Umat Beragama	120
11	Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	122

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Grafik Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Kalipare	8
2	Analisis Data Model Interaktif	58
3	Peta Kabupaten Malang	62
4	Pembagian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Malang	63
5	Peta Kecamatan Kalipare	65
6	Peta Desa Arjowilangun	67
7	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Arjowilangun	69
8	Kegiatan Musrenbangdes Desa Arjowilangun	85
9	<i>Banner</i> Besaran dan Penggunaan ADD di Desa Arjowilangun ..	95
10	Kegiatan Membangun Tembok Penahan Tanah	100
11	Kegiatan Membuat Selokan (Saluran Air)	101
12	Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan	101
13	Surat Pengantar Pencairan Dana ADD yang dikeluarkan oleh PTPKD	104
14	Padepokan Eyang Demang Merthowijoyo	105
15	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana	106
16	Gapura Masuk Desa Arjowilangun	108
17	Pembinaan LINMAS	110
18	Kegiatan Pembinaan Sepak Bola Desa Arjowilangun	113
19	Surat Pengantar Pencairan Dana ADD yang dikeluarkan oleh PTPKD	116
20	Kegiatan Pertemuan Rutin PKK	117
21	Kegiatan Sosialisasi Bank Sampah	117
22	Kegiatan Pelatihan Membuat Hantaran	118

23	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PAUD	119
24	Pengajian pada Bersih Desa Arjowilangun	121
25	Kegiatan Keagamaan dan adat istiadat pada Bersih Desa Arjowilangun	121
26	Pemberian Insentif Kepada Guru PAUD oleh Kepala Desa Arjowilangun	122
27	Pemberian Bantuan kepada Guru PAUD oleh Kepala Desa Arjowilangun	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pusat melalui kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, namun dalam pelaksanaannya tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah di luar kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan tersebut untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah, sedangkan bertanggung jawab dalam arti penyelenggaraan otonomi yang sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah menjadi cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal (Oleh, 2014:1). Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik berat otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, tetapi jika dilihat, esensi otonomi daerah ini berdasarkan pada kemandirian yang dimulai dari level pemerintahan pada tingkat paling bawah yaitu desa. Oleh karena itu, pembangunan daerah seharusnya lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Widjaja (2014:3-4) menyebutkan bahwa secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Desa memiliki wewenang yang mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dan tinggal di wilayah pedesaan, hal ini membuat desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan nasional. Pembangunan daerah pedesaan menjadi prioritas utama yang terus digalakkan untuk menunjang pembangunan nasional. Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan daerah dan pembangunan nasional, karena di dalamnya terkandung hasil-hasil pembangunan yang menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa sebagai prioritas utama dalam pembangunan desa menjadi indikator utama dalam keberhasilan pembangunan desa maupun pembangunan daerah. Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang sebagian besar penduduknya hidup di pedesaan, dimana masih banyak masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat keberdayaan yang rendah sehingga hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan yang mengakibatkan kemiskinan yang berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi ekonomi, pendidikan,

maupun kesehatan. Banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan dalam usaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat di pedesaan perlu diberdayakan untuk lebih mandiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setiap tahunnya gencar menggalakkan program-program yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Berdasarkan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri, untuk melaksanakan kewenangannya sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan desa, tentunya desa membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Desa memiliki sumber-sumber penerimaan atau sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari: (1) pendapatan asli desa (yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya); (2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota; (4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; (5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; (6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, salah satu sumber penerimaan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dalam bentuk bervariasi, dimana pemberian dana tersebut melihat luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografisnya, dengan rincian 100% Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 30% untuk aparatur desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan publik.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan desa dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Hal ini dilakukan agar desa dapat berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat desa. Salah satu alasan rasional mengapa perlu adanya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sejalan dengan agenda otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis dari desentralisasi, karena desa berhadapan langsung dengan

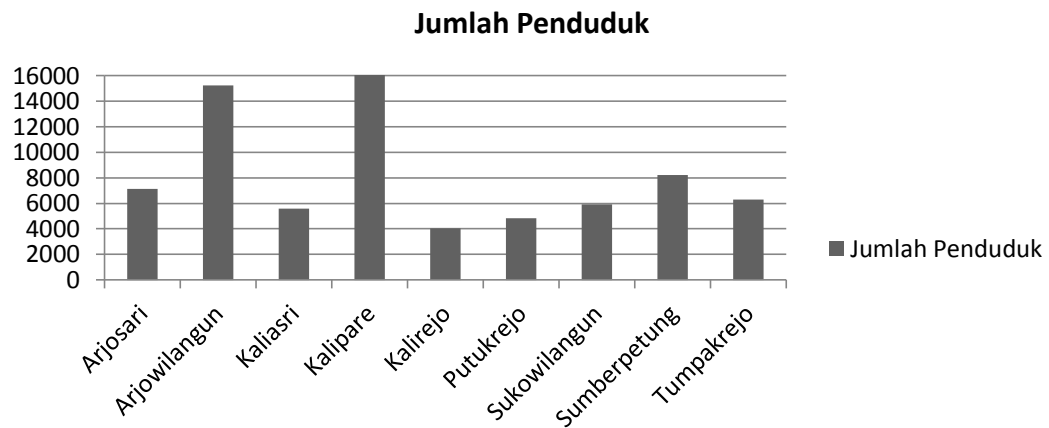
masyarakat dan kontrol masyarakat yang lebih kuat. Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam pembiayaan program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dibangun melalui konsep pembangunan diharapkan dapat mengembalikan masyarakat pada nilai-nilai luhur bangsa, dimana kehadiran dan keterlibatan masyarakat merupakan tolak ukur tingkat keberhasilan pembangunan. Konsep dan program dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, mengalami kegagalan dalam penerapannya yang disebabkan kurangnya respon, keterlibatan, dan partisipasi masyarakat. Realitanya, pemerintah cenderung memonopoli, sehingga menimbulkan sifat ketergantungan pada birokrasi dalam segala hal. Pemerintah menganggap merekalah yang dapat mengerti dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Program-program pemberdayaan masyarakat desa tidak semata-mata terbatas pada implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar saja, tetapi upaya dengan macam kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung pada pemerintah. Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa (ADD), menjadi wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa serta

untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa menuju suatu kondisi masyarakat yang terberdaya dan mandiri. Dengan adanya dukungan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) ini, diharapkan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat desa, dimana semua semua pihak termasuk masyarakat desa ikut andil dalam pengembangan desanya.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang telah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya kepada 378 desa dengan jumlah Rp 183 miliar pada tahun 2016 (Wahyunik, 2017). Salah satu desa di Kabupaten Malang yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Desa Arjowilangun yang terletak di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Desa Arjowilangun merupakan desa di wilayah Kecamatan Kalipare yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 15.251 jiwa, serta jumlah wilayah 1.356 Ha, yang merupakan jumlah penduduk tertinggi kedua dan luas wilayah terluas di antara delapan desa lainnya, yaitu Desa Arjosari sebanyak 7.117 jiwa, Desa Kaliasri sebanyak 5.572 jiwa, Desa Kalipare sebanyak 16.542 jiwa, Desa Kalirejo sebanyak 4.036 jiwa, Desa Putukrejo sebanyak 4.822 jiwa, Desa Sukowilangun sebanyak 5.942 jiwa, Desa Sumberpetung sebanyak 8.208 jiwa, dan Desa Tumpakrejo sebanyak 6.293 jiwa, dapat dilihat pada grafik jumlah penduduk berikut:



Gambar 1 Grafik Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Kalipare Tahun 2017

Sumber: Data Pemutakhiran IDM 2017 Kecamatan Kalipare

Desa Arjowilangun merupakan desa dengan masyarakat paling banyak kedua dan desa dengan wilayah paling luas di antara delapan desa lainnya di wilayah Kecamatan Kalipare, serta penerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) paling tinggi di Kecamatan Kalipare pada tahun anggaran 2016. Masyarakat Desa Arjowilangun adalah masyarakat desa dengan kesejahteraan yang tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat di delapan desa lainnya. Hal tersebut merupakan hasil dari keberhasilan pemerintah Desa Arjowilangun dalam memberdayakan masyarakatnya melalui pembangunan desa baik berupa infrastruktur fisik maupun non fisik serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Desa Arjowilangun merupakan satu dari dua desa di Kabupaten Malang yang merupakan penyumbang TKI terbesar di Kabupaten Malang. Desa Arjowilangun sebagai kantong TKI terbesar di Kabupaten Malang, membuat kesejahteraan masyarakatnya meningkat pesat, terlebih didukung dengan pemerintah desa dan kelompok masyarakat desa seperti PKK dan Karang Taruna yang aktif dalam mendukung program-program pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan pemerintah Desa Arjowilangun dalam pemberdayaan masyarakat desa tidak lepas dari ketepatan pemerintah Desa Arjowilangun dalam mengelola keuangan desa, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa Arjowilangun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan partisipasi masyarakat serta penyaluran dana yang tepat sasaran untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun terlihat cukup efektif, hal ini terlihat dari mekanisme perencanaan yang efektif dengan waktu perencanaan yang luas, berjalannya fungsi lembaga desa, serta tingginya partisipasi masyarakat Desa Arjowilangun, dibandingkan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di delapan desa lainnya di wilayah Kecamatan Kalipare.

Jumlah penduduk yang tinggi dan wilayah desa yang luas dibandingkan dengan delapan desa lainnya, tidak lantas menjadikan pemerintah Desa Arjowilangun kesulitan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, namun sebaliknya, pemerintah Desa Arjowilangun efektif dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) jika dibandingkan dengan delapan desa lainnya dengan jumlah penduduk yang lebih rendah dan luas wilayah desa yang kecil di wilayah Kecamatan Kalipare. Keberhasilan pemerintah Desa Arjowilangun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak lepas dari peran serta lembaga desa yang aktif dan partisipasi masyarakat desa yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

(ADD) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Tahun Anggaran 2016) (Studi pada Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.
2. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berbasis

pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi atau manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dan referensi dan bagi mahasiswa mengenai ilmu pengetahuan dan wawasan tentang kemandirian fiskal suatu daerah, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi publik.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan saran yang membangun bagi aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kinerja yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa untuk mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan agar lebih baik lagi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti serta diharapkan menjadi sarana dalam meningkatkan kemampuan ilmiah peneliti dan teori-teori yang didapatkan dan dipelajari dalam aspek penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini mengetahui seluk-beluk pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan model-rangka penulisan yang tertata dan berurutan agar memudahkan peneliti untuk melakukan pengembangan penulisan yang baik dan memudahkan pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh. Secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang perumakan susunan keseluruhan skripsi ini secara singkat.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang penelitian dengan mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi serta diungkapkan pula berbagai pertimbangan sehingga perlu mengangkat permasalahan tersebut. Latar belakang penelitian ini adalah dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah mampu melaksanakan pembangunan dalam rangka pembangunan nasional yang dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa. Pembangunan desa dilaksanakan

dalam rangka pembangunan nasional salah satunya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber pendapatan desa, salah satunya Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka disajikan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang selanjutnya diungkapkan pada studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul. Teori-teori yang digunakan merupakan teori yang dapat mendukung dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori Administrasi Publik, teori Desa, teori Alokasi Dana Desa (ADD), dan teori Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian, dijelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, yang di dalamnya terdapat jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

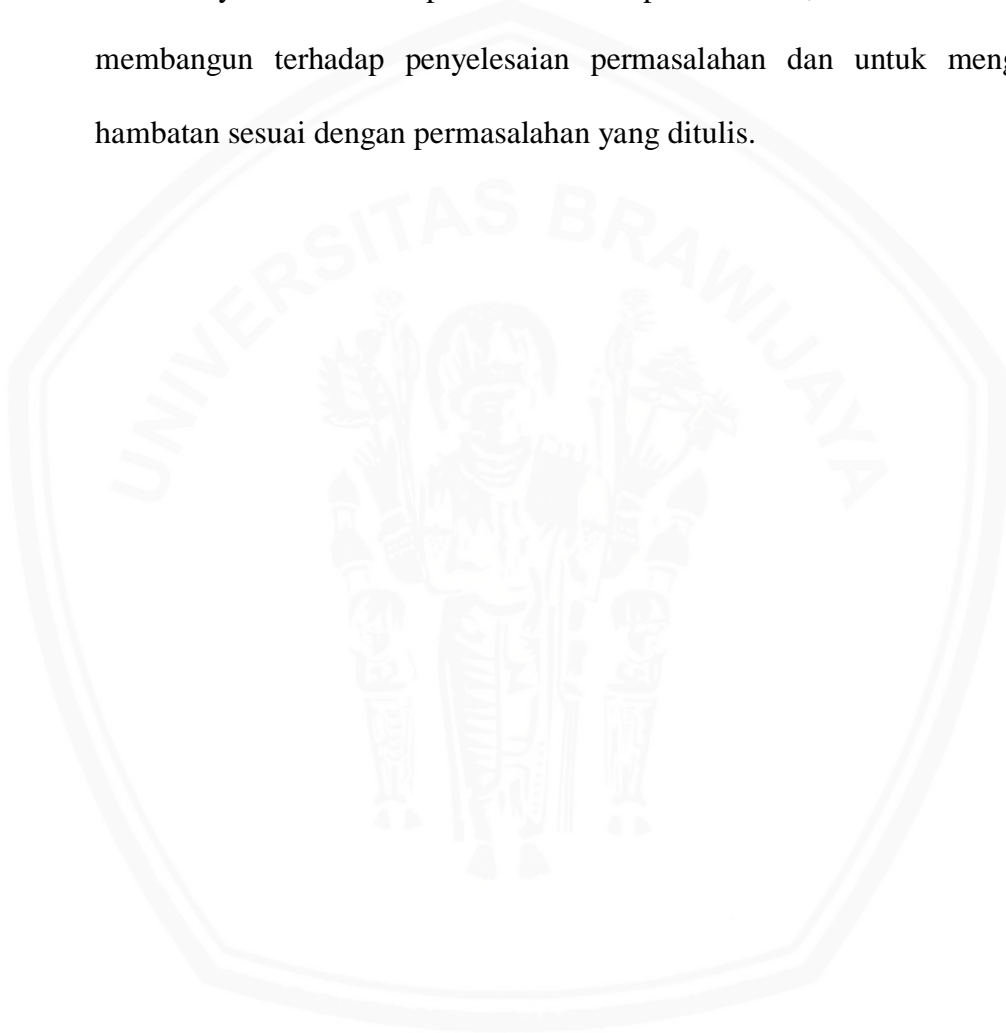
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, dijabarkan mengenai gambaran umum lokasi dan situs penelitian, serta penjabaran mengenai hasil-hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi yang di dalamnya

disertakan kutipan wawancara dengan narasumber serta data atau dokumen yang berkaitan dengan hasil peneitian

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup, berisi tentang seluruh kesimpulan dari bab-bab sebelumnya atau kesimpulan dari skripsi tersebut, serta saran yang membangun terhadap penyelesaian permasalahan dan untuk mengatasi hambatan sesuai dengan permasalahan yang ditulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian dengan topik yang sama namun dengan judul yang berbeda, namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Baura, Mandey, dan Tulusan/Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD) (Suatu Studi di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)	Jenis Penelitian Deskriptif-Kualitatif	Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti belum sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah asas transparansi. Pemerintah desa tidak secara terbuka kepada masyarakat mengenai	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian di Desa Bukumatiti ini tidak ada laporan pertanggungjawabannya sebagai bentuk pertanggungjawab an pemanfaatan

			<p>penggunaan ADD, yang disebabkan oleh pemerintah desa yang belum paham mengenai asas-asas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>Pertanggungjawaban dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan ADD di Desa Bukumatiti belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah desa tidak ada pertanggungjawaban tentang biaya yang dikeluarkan dalam pemanfaatan ADD. Dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Bukumatiti tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang dicapai.</p>	<p>ADD, sedangkan penelitian ini dalam pengelolaan ADD, pertanggungjawabannya berupa Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa.</p>
2.	Karimah, Saleh, dan Wanusmawatie/Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket	Jenis Penelitian Deskriptif-Kualitatif	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian di Desa Deket Kulon ini</p>

	Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)		secara normatif dan administratif sudah baik, namun secara substansi harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal, serta peran <i>stakeholder</i> yang belum maksimal pula. Hasil pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh ADD meliputi pemberdayaan lingkungan berupa pembangunan infrastruktur jalan dan pemberdayaan manusia melalui karang taruna dan PKK.	menekankan peran peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan ADD, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan peneliti hanya membahas sedikit mengenai partisipasi lembaga-lembaga selain pemerintah desa.
3.	Oleh, Helen Florensia/2014/Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri	Jenis Penelitian Deskriptif-Kualitatif	Adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Cerme memberikan dampak positif bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa. Dengan adanya ADD memberikan keleluasaan dari Desa Cerme untuk mengelola pemerintah desa, pembangunan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian pelaksanaan ADD di Desa Cerme ini tidak membahas mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat

			serta sosial kemasyarakatannya secara otonom.	dalam pelaksanaannya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti juga membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ADD.
4.	Putra, Pratiwi, dan Suwondo/Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	Jenis Penelitian Deskriptif-Kualitatif	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang menunjukkan sebagian dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD, partisipasi masyarakat cukup tinggi namun dalam proses aspirasi masih terkendala oleh rendahnya pendidikan masyarakat. Dalam penganggaran ADD tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang ADD, yang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari ini dalam penganggaran ADD belum sesuai dengan Peraturan Bupati Malang mengenai Alokasi Dana Desa, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti, pengelolaan ADD disesuaikan dengan Peraturan Bupati Malang.

			<p>mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Penggunaan ADD berdasarkan sasaran pemberdayaan sudah berjalan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal.</p>	
5.	<p>Febriadmadja, Henariza/2014/Praktik Sosial Dalam Alokasi Dana Desa untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)</p>	<p>Jenis Penelitian Kualitatif</p>	<p>Praktik sosial dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan Alokasi Dana Desa berupa perencanaan pembangunan plengsengan, perencanaan pembangunan pagar pembatas perum GWI, perencanaan pengadaan pagar besi balai desa, perencanaan pembangunan lapangan badminton, perencanaan penguatan kelembagaan karang taruna, perencanaan penguatan kelembagaan LKMD, dan pembangunan BBGRM, yang dalam kegiatan perencanaan tersebut melibatkan masyarakat melalui</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah dalam penelitian di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang ini membahas dan menekankan praktik sosial atau peran serta masyarakat pada proses perencanaan dalam ADD, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas secara umum bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan karena dalam penelitian ini membahas pengelolaan ADD dan hasil</p>

			Musrenbang.	pemberdayaan yang didanai oleh ADD.
--	--	--	-------------	-------------------------------------

B. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Administrasi berasal dari kata *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi (Sukidin, 2009:4). Kusumaatmadja dalam Sjamsuddin (2014:21), mendefinisikan administrasi dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari dua arti, dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan tulis menulis, catat mencatat dalam setiap kegiatan atau tata usaha, dan dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Sukidin (2009:5), administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan sebelumnya. Simon dalam Pasolong (2012:50) menyebutkan bahwa *administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals* yang berarti bahwa administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

2. Pengertian Publik

Istilah “publik” berasal dari Bahasa Inggris *public* yang berarti umum,

masyarakat atau negara. Yang didefinisikan sebagai umum misalnya *public ownership* (milik umum), *public utility* (perusahaan umum), *public interest* (kepentingan publik) dan sebagainya. Yang didefinisikan sebagai masyarakat misalnya *public relation* (hubungan masyarakat), *public interest* (kepentingan publik), *public service* (pelayanan publik) dan sebagainya. Sedangkan yang didefinisikan sebagai negara misalnya *public authorities* (otoritas negara), *public sector* (sektor negara), *public finance* (keuangan negara) dan sebagainya.

Dari berbagai definisi tersebut terdapat perbedaan dalam mendefinisikan istilah “publik”, bahwa arti dari publik itu sendiri adalah sejumlah manusia memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Itulah sebabnya istilah “publik” tidak langsung didefinisikan sebagai penduduk, masyarakat, warga negara maupun rakyat, karena memiliki arti yang berbeda.

3. Pengertian Administrasi Publik

Chandler & Plano dalam Keban dalam Pasolong (2012:55) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler & Plano dalam Keban dalam Pasolong (2012:55) juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affair* dan melaksanakan

berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Menurut Nigro & Nigro dalam Pasolong (2012:56) menyatakan bahwa:

“administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Mempunyai peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan beberapa definisi administrasi publik tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik lebih menekankan pada proses institusional yaitu bagaimana usaha kerjasama dalam kelompok sebagai kegiatan publik yang berbeda dengan kegiatan swasta.

C. Administrasi Desa

1. Konsep Desa

Istilah “desa” berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu *deshi* yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan administratif yang terletak di luar kota. Desa menjadi tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama agar dapat mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Widjaja (2014:3-4) menyebutkan bahwa secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa

ini terbentuk. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada bab I pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan wujud dari salah satu adanya otonomi daerah. Menurut Rozaki (2005:19), otonomi desa dinilai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya dan kepentingan masyarakat setempat. Sering muncul pemahaman bahwa otonomi desa adalah kemandirian desa yang ditopang dengan swadaya dan gotong royong masyarakat setempat untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.

Rozaki (2005:15) mengatakan bahwa tujuan otonomi desa yaitu semakin transparansinya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya pembangunan desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa menjadi ringan dengan adanya otonomi

desa. Selain itu otonomi desa akan memberikan ruang gerak bagi desa untuk melakukan suatu pemerintahan dan pembangunan desa.

Kewenangan yang dimiliki desa menjadikan desa memiliki hak untuk membuat suatu perencanaan pembangunan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang diharapkan dapat menjadikan desa lebih berkembang. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan untuk keberlangsungan otonomi desa, salah satunya melalui pemberian dana berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dengan harapan agar desa dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri termasuk dalam urusan keuangan.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil, yang bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk mengadakan pemerintahan sendiri. Desa memiliki hak yang diakui undang-undang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, desa diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan pendelegasian dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemberian atau pendelegasian kewenangan kepada desa dimaksudkan untuk memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah desa untuk mengurus dan mengatur sistem pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 25 disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Untuk menjalankan tugas pokok dalam pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
- g. Penyusunan, pengajuan rancangan pengaturan desa;
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa yang disusun oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa tersebut dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4. Keuangan Desa

Dalam menjalankan sebuah organisasi pemerintahan termasuk pemerintahan desa, diperlukan aspek-aspek pendukung yang akan mendukung terlaksananya program-program yang sudah direncanakan. Salah satu aspek yang paling penting adalah dana. Dana yang dikelola oleh desa, biasa disebut dengan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan secara terperinci mengenai bagaimana mengelola keuangan desa dengan benar, antara lain sebagai berikut:

- a. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;

- b. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, panatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;
- d. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
- e. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah peangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
- f. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
- g. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;

- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya RPJMDes adalah dokumen perencanaan ddesa untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa salah satu sumber dari Dana Desa adalah dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran bersumber dari APBN merupakan anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa yang berasal dari APBN telah ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah. Pada Pasal 72 dijelaskan bahwa keuangan desa meliputi:

1. Sumber pendapatan desa terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
 3. Bagian hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
 4. Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 5. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.
 6. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok transfer sebagaimana yang dimaksud terdiri atas Dana Desa, Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana

Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

D. Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (4), Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa, agar desa dapat melaksanakan otonomi desa dengan seluas-luasnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian Alokasi Dana Desa diharapkan menjadi sumber pembiayaan bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak terpisah dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Maryunani (2002:86), tujuan Alokasi Dana Desa adalah untuk mencapai pemerataan, dan jenis dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dana yang bersifat umum. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa adalah dana yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Sedangkan tujuan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa;
- h. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- i. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimilikinya; dan
- j. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

3. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Malang mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APDD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan dengan mempertimbangkan: (1) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan (2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

4. Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri dari:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan BPD;
 - d. Operasional BPD;
 - e. Operasional perkantoran; dan
 - f. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.

2. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

b. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- 1) ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
- 2) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
- 3) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
- 4) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus

enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- c. Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf b diterapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- d. Besaran penghasilan tetap per bulan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Sekretaris Desa selain PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan
 - 3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
- e. Selain penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa juga diberikan tunjangan setiap bulan yang dananya bersumber dari APB Desa dalam hal ini bersumber dari ADD sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan tetap yang diterima perbulan;
 - 2) Sekretaris Desa selain PNS paling banyak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap yang diterima perbulan;

- 3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling banyak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap yang diterima perbulan.
3. Selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk:
 - a. Pembinaan kemasyarakatan;
 - b. Belanja tak terduga;
 - c. Dana cadangan yang digunakan untuk pemilihan Kepala Desa dan Musyawarah Desa;
 - d. Pembelian dan /atau pemeliharaan aplikasi /sistem koordinasi;
 - e. Biaya berlangganan internet;
 - f. Berlangganan media baca; dan
 - g. Dapat digunakan untuk menunjang infrastruktur.
4. Selain tunjangan yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok yang perhitungannya tidak masuk dalam APB Desa.

5. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan (Terry, 2009:17). Menurut Terry (2009:46-47), perencanaan merupakan suatu pendekatan yang terorganisir untuk menghadapi masalah-masalah di masa yang akan datang. Perencanaan yang efektif didasarkan pada fakta dan informasi bukan atas dasar emosi atau keinginan, yang mana seorang perencana harus mampu menggambarkan pola kegiatan yang diusulkan secara jelas.

Proses perencanaan diawali dengan musyawarah desa yang merupakan forum pertemuan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, dan dipimpin oleh Kepala Desa yang bertujuan untuk membahas perencanaan APB Desa dan RKP Desa yang merupakan hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh Kepala Desa khusus untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang di dalamnya terdapat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sasaran musyawarah desa adalah menyusun rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, dimana ADD merupakan suatu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam

Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa dengan dihadiri Tim Pembina Kecamatan.

b. Pencairan dan Penyaluran

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2. Tahap II pada Bulan Juni sebesar 60% (enam puluh per seratus).

Mekanisme pencairan ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diverifikasi dengan menggunakan surat pengantar Camat dengan dilampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Pencairan ADD tahap I:
 - a) Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan format aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - b) LPP Desa tahun sebelumnya yang dihimpun di Kantor Kecamatan;
 - c) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 - d) RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan PTPKD;

- f) Fotokopi rekening kas Desa rangkap 3 (tiga);
 - g) Fotokopi NPWP Bendahara Desa rangkap 3 (tiga);
 - h) Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa masing-masing rangkap 3 (tiga);
 - i) Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga) yang asli bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
2. Pencairan ADD tahap II:
- a) Laporan realisasi penggunaan Tahap I;
 - b) Fotokopi rekening kas Desa rangkap 3 (tiga);
 - c) Fotokopi NPWP Bendahara Desa rangkap 3 (tiga);
 - d) Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa masing-masing rangkap 3 (tiga);
 - e) Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga) yang asli bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Hasil verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk surat pernyataan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyalurkan ADD dengan cara transfer melalui Bank Jatim Cabang Kepanjen ke rekening kas desa dengan dilampirkan:

1. Fotokopi rekening kas desa rangkap 2 (dua);
2. Fotokopi NPWP Bendahara Desa rangkap 2 (dua);

3. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa masing-masing rangkap 2 (dua);
4. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua) yang asli bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

c. Pelaksanaan

Persiapan setelah ADD masuk ke dalam rekening kas desa, Kepala Desa segera mengadakan rapat di desa yang dihadiri oleh Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, yang membahas:

1. Pelaksanaan kegiatan dan penjadwalan;
2. Pembagian tugas para pelaksana kegiatan;
3. Kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan, hasil rapat dituangkan dalam berita acara.

Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan ADD secara riil, sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui. Dalam pelaksanaan kegiatan hal-hal yang diperhatikan adalah:

1. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu;

2. Memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka;
3. Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial;
4. Perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan;
5. Setiap pembelian barang dan jasa dikenakan pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku.

d. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan atau pengendalian merupakan suatu kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana atau tidak (Terry, 2009:18). Menurut Terry (2009:166), pengawasan atau pengendalian adalah suatu usaha untuk meneliti apakah kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, agar berorientasi pada obyek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang yang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai.

Pembinaan dalam pengelolaan ADD dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan maupun terhadap pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah terkait. Sedangkan Pengawasan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa, Camat dan Inspektorat Daerah.

e. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD dilakukan sebagai berikut:

1. Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada PTPKD;
2. PTPKD menghimpun semua pertanggungjawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk rekapitulasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD, yang selanjutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati;
5. Surat pertanggungjawaban menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
6. Setiap pengeluaran keuangan yang harus membayar pajak agar disesuaikan dengan aturan perpajakan.

Sedangkan, pelaporan dalam pengelolaan ADD dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan penggunaan ADD dilakukan setiap tahap oleh Kepala Desa kepada Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
2. Surat pertanggungjawaban disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah.

E. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata - *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Menurut Hary dalam Surjono dan Nugroho (2007:25) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.

Konsep pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) mulai muncul sekitar dekade tahun 1970-an, dan terus berkembang sampai dengan tahun 1990-an (atau akhir abad ke 20). Kemunculan konsep pemberdayaan ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Konsep pemberdayaan dipandang sebagai bagian dari aliran

yang muncul para paruh abad ke-20 yang lebih dikenal dengan aliran *post-modernism*. Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari aksi dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara (Suryono, 2010:260).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep yang mulia karena sangat menghargai harkat dan martabat manusia. Konsep pemberdayaan masyarakat analogis dengan konsep demokrasi dan kesejahteraan sosial serta kedaulatan rakyat (Suhendra, 2006:81). Menurut Friedman dalam Suryono (2010:260-261), konsep pemberdayaan masyarakat merupakan resultan dari kegagalan arus utama model pengembangan ekonomi yang berupa ketidakmampuan memecahkan masalah kemiskinan dan keberlangsungan lingkungan, sehingga membutuhkan sebuah alternatif pembangunan yang lain. Pengertian pemberdayaan masyarakat mengasu pada *empowerment* yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Suryono (2010:262), mengatakan bahwa salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah dengan menekankan pada arti pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mampu mengorganisir dirinya sendiri.

Menurut Adi (2008: 83-84), upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai program ataupun sebagai proses. Sebagai suatu program, pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan jangka waktunya seperti dalam jangka waktu satu, dua, atau lima tahun. Konsekuensinya, jika jangka

waktu program tersebut telah selesai, maka pemberdayaan sudah selesai dilakukan.

Sedangkan, pemberdayaan sebagai suatu proses adalah pemberdayaan sebagai proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan sepanjang hidup seseorang. Hogan dalam Adi (2008:84) melihat proses pemberdayaan individu sebagai proses yang relatif dan terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukan suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja. Hogan dalam Adi (2008:85) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya.

Berdasarkan tahapan pemberdayaan yang berkesinambungan tersebut, Hogan dalam Adi (2008:86) meyakini bahwa proses pemberdayaan yang terjadi tidaklah berhenti pada suatu titik tertentu, tetapi lebih merupakan sebagai upaya berkesinambungan untuk meningkatkan daya yang ada. Dalam konteks kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan yang dijelaskan Hogan

dalam Adi (2008:86) tentunya juga terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari suatu tingkatan ke tingkat yang lebih baik, tentunya dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi kurang berdaya.

Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberi kuasa dan kemampuan kepada masyarakat terutama kelompok marjinal. Menurut Suhendra (2006:104), pemberian kuasa kepada masyarakat diantaranya:

- a. Kuasa untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas secara bebas
- b. Kuasa untuk merencanakan demi kepentingan pribadi, keluarga maupun masyarakat
- c. Kuasa untuk mengelola operasionalisasi berdasarkan perencanaan yang telah dibuat
- d. Kuasa untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan tanpa tekanan dari pihak manapun
- e. Kuasa untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan
- f. Kuasa untuk ikut menikmati hasil pembangunan yang menjadi haknya
- g. Kuasa untuk mendapat perlakuan adil dari penguasa secara politis, hukum, ekonomi maupun budaya
- h. Kuasa untuk disertakan sebagai mitra pemerintah maupun dunia usaha
- i. Kuasa untuk menentukan hari depan keluarga

- j. Bentuk keadilan serta kesejahteraan sosial yang bisa diperoleh sebagai haknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dalam upaya tersebut meliputi berbagai aspek diantaranya adalah aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup. Pemberdayaan sendiri memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah, khususnya pemerintah desa serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2. Bias dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan program-program atau upaya-upaya dalam pemberdayaan masyarakat sering terjadi “bias”. Suhendra (2006:96) menjelaskan bias diartikan sebagai hasil-hasil dari pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan perencanaan dan deviasi atau sasaran yang tidak tepat. Bias dalam pemberdayaan masyarakat dapat terjadi karena beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- a. *Top down planning*

Perencanaan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat berdasarkan-

feel needs (perasaan) sang perencana, bukan berdasarkan *riil needs* masyarakat setempat yang menjadi sasaran pemberdayaan.

b. Kompetensi pekerja dibidang pengembangan masyarakat kurang

Pekerja pengembang masyarakat seharusnya memerankan diri sebagai pendamping dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran agar masyarakat dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pekerja pengembang masyarakat berkerja bersama masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat, karena sekarang ini pertolongan-pertolongan yang dilakukan lebih bersifat belas kasihan yang nantinya akan menimbulkan ketergantungan bukan kemandirian. Hal ini bisa terjadi karena petugas pendampingan di masyarakat kurang memiliki keterampilan pengembangan masyarakat.

c. Terburu-buru ingin melihat hasil

Dalam pengembangan masyarakat sering kali muncul keinginan untuk cepat selesai agar dapat segera melihat hasil sehingga mengabaikan proses. Dengan keinginan melihat hasil, tidak jarang banyak pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh masyarakat, dilaksanakan sendiri oleh pelaksana program/proyek yang seharusnya hanya sebagai pendamping atau fasilitator.

d. Pekerja pengembang masyarakat/publik memiliki harapan tertentu

Sebagai konsekuensi logis program dan kegiatan pengembangan masyarakat di dalamnya melekat dana. Dalam setiap transaksi mempunyai “nilai lebih” yang menjadi alasan atau harapan tertentu

dari pekerja pengembang masyarakat sehingga pendelegasian wewenang dan tugas terhadap masyarakat yang diberdayakan menjadi tersumbat.

- e. Persepsi yang keliru bahwa masyarakat yang kurang beruntung lemah (tidak mampu)

Selama ini ada sikap *underestimate* terhadap penyandang masalah sosial, yaitu mereka yang lemah adalah mereka yang tidak bisa dipercaya. Oleh karenanya pekerja pengembang masyarakat harus tetap berfungsi sebagai motivator bukan pelaksana langsung.

- f. Pendamping lokal yang tidak memihak masyarakat

Pendamping lokal, pimpinan lokal dan LSM lebih merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Pada pelaksanaannya pimpinan lokal dan LSM sibuk melakukan motivasi dan sosialisasi untuk meminta persetujuan rakyat dengan janji yang muluk-muluk dan tidak berpihak kepada masyarakat.

- g. Tokoh lokal yang mengatasnamakan masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan diawali dengan musyawarah desa yang diwakili oleh warga desa serta lembaga-lembaga desa yang mewakili masyarakat, padahal masyarakat tidak merasa terwakili aspirasinya.

- h. Peran pihak ketiga

Pelaksanaan program dan proyek terutama pengadaan sarana dan-

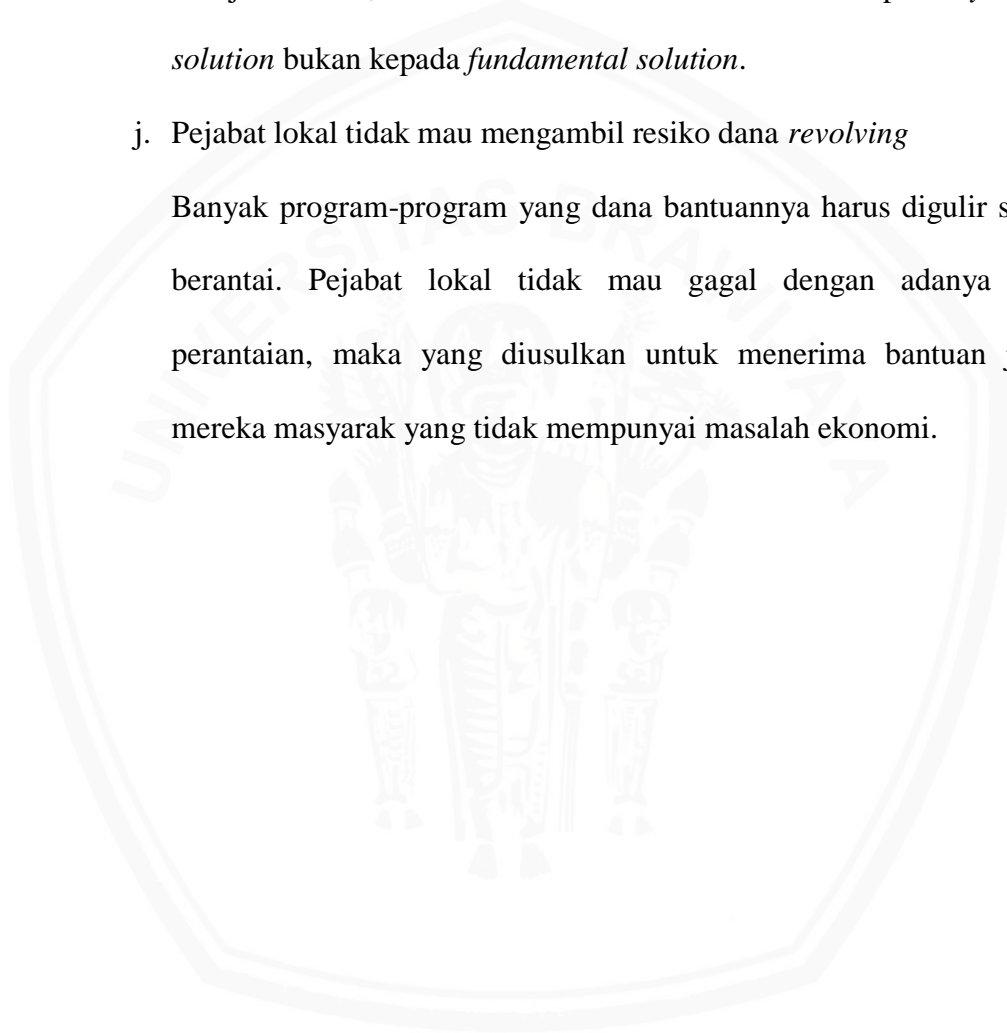
prasarana adalah melalui pihak ketiga yang harus memikirkan gaji karyawan dan lain-lain yang dananya dibebankan oleh program.

i. Pelayanan yang terfokus pada *symtonic solution*

Selama ini bentuk-bentuk pertolongan dan pelayanan sosial lebih tertuju ke hilir, bukan ke hulu atau lebih terarah kepada *syntomic solution* bukan kepada *fundamental solution*.

j. Pejabat lokal tidak mau mengambil resiko dana *revolving*

Banyak program-program yang dana bantuannya harus digulir secara berantai. Pejabat lokal tidak mau gagal dengan adanya dana perantaraan, maka yang diusulkan untuk menerima bantuan justru mereka masyarakat yang tidak mempunyai masalah ekonomi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, penggunaan metodologi merupakan langkah yang harus ditempuh agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab dengan valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan menjadi suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi publik. Metode penelitian memiliki peranan penting dalam usaha mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan. Pelaksanaan penelitian harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar mempermudah peneliti dalam menggunakan data yang relevan sehingga mempermudah dalam menganalisis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:9) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala dan juga untuk menjawab pertanyaan sehubungan dengan status obyek penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan melihat dan menjelaskan perkembangan fenomena sosial berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena metode ini relevan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial serta

akan mempermudah dalam mendapatkan pemahaman mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis serta dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis maupun mengembangkan laporan. Pemilihan metode ini dikarenakan penelitian dilakukan dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam penelitian didasarkan pada tingkat keterbaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi di lapangan. Fokus penelitian memberikan batasan-batasan pada objek yang diteliti agar dapat terkonsentrasi pada masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini berfokus pada beberapa pokok pembahasan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang meliputi:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, meliputi:
 - 1) Perencanaan
 - 2) Pencairan dan Penyaluran
 - 3) Pelaksanaan
 - 4) Pembinaan dan Pengawasan
 - 5) Pertanggungjawaban dan Pelaporan
 - b. Hasil pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang meliputi:
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian, dimana dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Sedangkan, situs penelitian berada di Kantor Desa Arjowilangun, Jl. Diponegoro No. 1 Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih lokasi dan situs penelitian di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten

Malang karena Desa Arjowilangun merupakan desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang paling tinggi di Kecamatan Kalipare pada tahun anggaran 2016, serta memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua dan luas wilayah terbesar di antara delapan desa lainnya dalam satu wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

D. Sumber Data

Data merupakan faktor penting yang menunjang suatu penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui informasi-informasi yang diberikan oleh informan yang berhubungan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kepala Desa Arjowilangun; Bapak Kuswianto
 - b. Sekretaris Desa Arjowilangun; Ibu Istikomah
 - c. Bendahara Desa Arjowilangun; Bapak Mujito Nur Cahyo
 - d. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Arjowilangun; Ibu Arlina
 - e. Ketua Karang Taruna Desa Arjowilangun; Bapak Mateus Subowo
 - f. Masyarakat Desa Arjowilangun; Bapak Afandi, Bapak Mudiono, Bapak Yudhana

2. Data Sekunder adalah data yang tidak dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Secara umum data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer dan dapat diperoleh dari dokumen resmi, jurnal, artikel, buku, dan data dari situs internet. Sumber data sekunder yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi semua data yang berhubungan dengan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016.
 - b. Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan objek yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan

dengan cara melakukan percakapan dan tanya jawab secara langsung kepada informan yang mampu memberikan informasi terkait. Dalam melakukan wawancara dan mencatat segala informasi yang diberikan informan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepada informan, dimana pertanyaan yang diajukan kepada informan disesuaikan dengan fokus penelitian yang pada akhirnya diperoleh temuan di lapangan kemudian dikembangkan dengan data yang telah didapatkan menjadi suatu rangkaian informasi dalam bentuk deskriptif.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri secara langsung kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan pengamatan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai dokumen, baik berupa buku, laporan, ataupun peraturan perundang-undangan. Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare

Kabupaten Malang Tahun 2016 dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016.

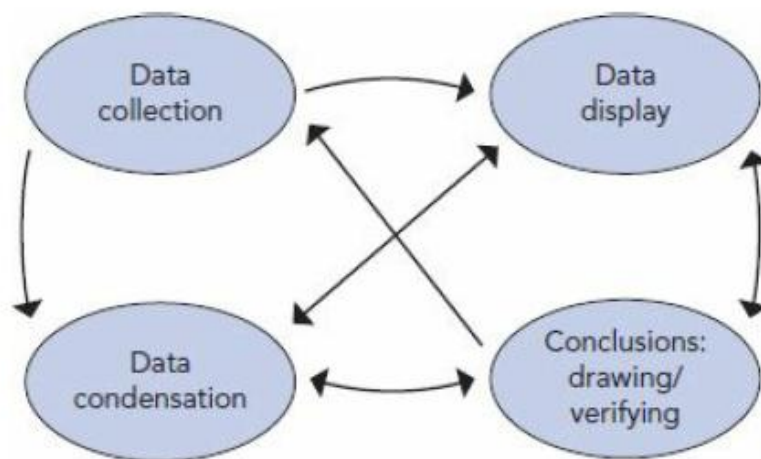
F. Instrumen Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian, salah satunya adalah kualitas instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti itu sendiri, karena dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, menetapkan informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan.
2. Pedoman wawancara, yang berisi daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara kepada narasumber agar data yang diperoleh relevan dengan penelitian yang dilakukan.
3. Instrumen pendukung, merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu penelitian. Dalam penelitian ini instrumen pendukung yang digunakan adalah alat perekam dan kamera sebagai alat bantu dalam kegiatan wawancara dan observasi maupun dokumentasi.

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014). Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:33), alur kegiatan analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles, Huberman & Saldana (2014:33)

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan. Kondensasi data tidak terpisah dari proses analisis data, karena kondensasi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan di verifikasi.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, data-data tersebut kemudian ditelaah. Data-data kasar yang telah ditemukan, kemudian

dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan ditransformasi dalam bentuk rangkuman, tabel, maupun gambar yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian ini. Dalam tahapan ini, peneliti mengabaikan data-data yang tidak berhubungan dengan masalah dan fokus penelitian, sehingga data-data dalam tahapan ini hanyalah data-data yang berhubungan dengan judul dan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Secara umum, penyajian data bersifat terorganisir yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, dapat membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis dengan lebih mudah. Penyajian data yang baik merupakan langkah yang tepat dalam mencapai analisis yang kuat. Seperti kondensasi data, tahapan penyajian data juga tidak terlepas dari proses analisis data.

Dalam tahapan penyajian data, peneliti menyajikan data sesuai dengan format laporan yang telah ditentukan, yang berisi informasi dalam bentuk laporan sesuai dengan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data tidak dapat dipisahkan dengan analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori maupun regulasi yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian. Sehingga data yang disajikan dapat memberikan pengetahuan dan kekayaan informasi.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih dapat bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang atau bahkan berubah setelah peneliti berada di lapangan.

Dari tahapan penyajian data, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah dianalisis dan disajikan. Setelah peneliti mengetahui makna dari setiap permasalahan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proporsi. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis data yang telah dihubungkan dengan teori dan regulasi yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya seluas 3.534,86 km² dengan jumlah penduduk sesuai Data Badan Pusat Statistik tahun 2015 sebanyak 2.544.315 jiwa yang tersebar di 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa. Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Kota Malang yang berada tepat di tengah-tengahnya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu di sebelah utara, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di sebelah barat. Berikut adalah peta Kabupaten Malang:



Gambar 3. Peta Kabupaten Malang
Sumber: Profil Kabupaten Malang, 2016

Pemerintahan Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat. Kecamatan dibagi menjadi desa dan kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan Lurah. Seluruh Camat dan Lurah merupakan jajaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten, sedangkan Kepala Desa dipilih oleh setiap warga desa dalam setiap periode tertentu dan memiliki sebuah pemerintahan desa yang mandiri. Pusat pemerintahan Kabupaten Malang berada di Kepanjen.

Kabupaten Malang terdiri atas 33 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Bantur, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Dampit, Kecamatan Dau, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan

Gedangan, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Jabung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Lawang, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pagak, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pakis, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pujon, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Singosari, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Turen, Kecamatan Wagir, Kecamatan Wajak serta Kecamatan Wonosari, yang selanjutnya dibagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Berikut adalah gambaran pembagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Malang:



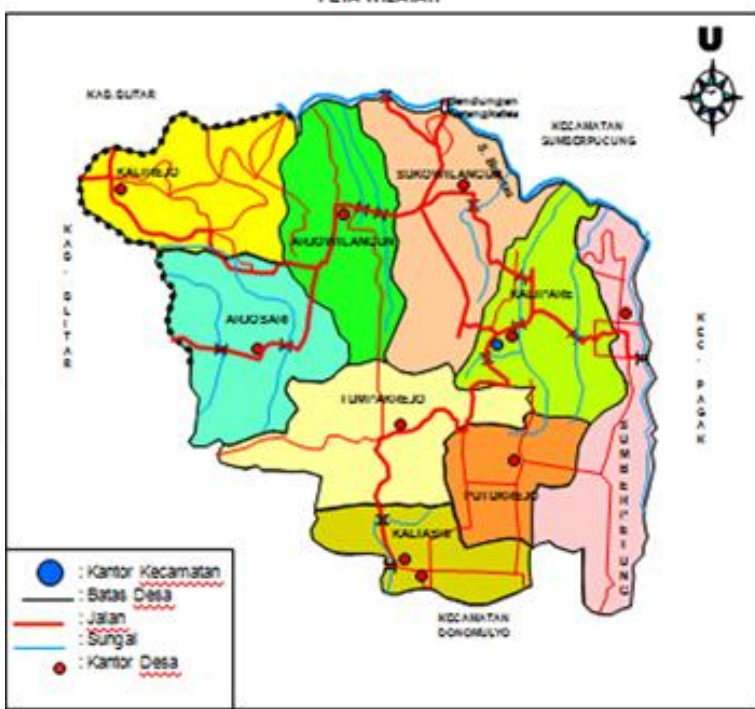
Gambar 4. Pembagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Malang
Sumber: Profil Kabupaten Malang, 2016

Kabupaten Malang dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi alam, diantaranya bidang pertanian dan perkebunan serta dikenal akan obyek wisata alamnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang adalah kawasan dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan yaitu Gunung Arjuno dan Gunung Kawi. Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru yaitu Gunung Bromo dan Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel, sedangkan daerah pegunungan di bagian barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil utama sayuran di Jawa Timur. Daerah selatan banyak ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak dan semangka.

2. Gambaran Umum Kecamatan Kalipare

Kecamatan Kalipare merupakan salah satu kecamatan dari 33 Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan Kalipare terletak di bagian selatan Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sumberpucung di sebelah utara, Kecamatan Pagak di sebelah timur, Kecamatan Donomulyo di sebelah selatan, dan Kabupaten Blitar di sebelah barat. Kecamatan Kalipare terdiri dari sembilan desa, 37 dusun, 60 RW dan 482 RT. Kesembilan desa di Kecamatan Kalipare adalah Desa Arjosari, Desa Arjowilangun, Desa Kaliasri, Desa Kalipare, Desa Kalirejo, Desa Putukrejo, Desa Sukowilangun, Desa Sumberpetung, dan Desa Tumpakrejo.

Kecamatan Kalipare pada tahun 2017 sebanyak 73.783 jiwa dengan mata pencaharian utama adalah sebagai petani dan buruh tani. Kondisi Geografis Kecamatan Kalipare merupakan pegunungan kapur (gugusan Pegunungan Kendeng), tanah sawah berupa lahan kering atau tadah hujan dengan mata utama pertanian dan perkebunan adalah tebu, jagung, dan ketela pohon. Berikut adalah peta Kecamatan Kalipare:



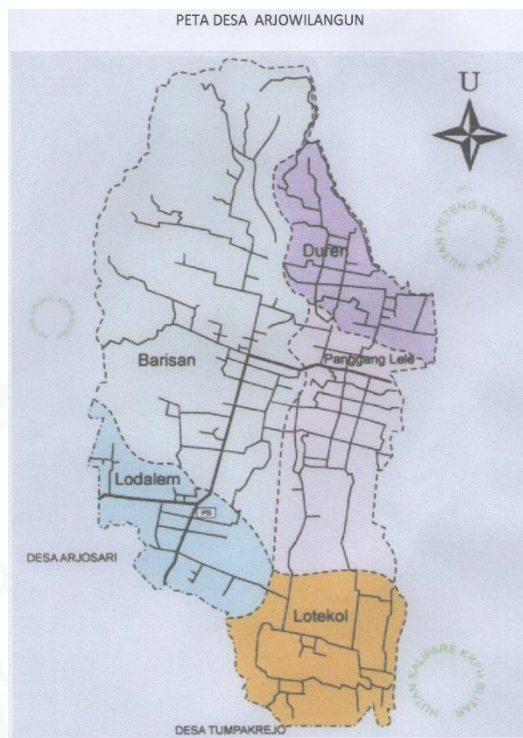
Gambar 5. Peta Kecamatan Kalipare
Sumber: Profil Kecamatan Kalipare, 2017

3. Gambaran Umum Desa Arjowilangun

a. Kondisi Geografis

Desa Arjowilangun merupakan salah satu dari sembilan desa yang berada di wilayah Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Desa Arjowilangun berbatasan dengan Sungai Brantas di sebelah utara, Desa Sukowilangun di sebelah timur, Desa Tumpakrejo di sebelah selatan, dan Desa Arjosari di sebelah barat. Desa Arjowilangun memiliki luas wilayah seluas 135,63 km² atau 1.356 Ha, yang terdiri dari 154,88 Ha luas pemukiman, 353,64 Ha luas persawahan, 669,32 Ha luas perkebunan, 4 Ha luas pemakaman, 155 Ha luas pekarangan, dan 19,47 Ha jalan desa.

Desa Arjowilangun dibagi menjadi 5 dusun, antara lain Dusun Barisan, Dusun Panggang Lele, Dusun Lotekol, Dusun Lodalem, dan Dusun Duren, yang terdiri dari 7 RW dan 68 RT. Pusat perekonomian Desa Arjowilangun berada di Dusun Panggang Lele dan Dusun Lodalem, karena di kedua dusun tersebut terletak pusat pasar di Desa Arjowilangun. Oleh karena itu, kegiatan perekonomian penduduk Desa Arjowilangun terpusat di Dusun Panggang Lele dan Dusun Lodalem. Dusun Barisan dianggap sebagai “ibukota” desa, karena selain sebagai letak Kantor Desa Arjowilangun, Dusun Barisan terdapat lebih banyak pusat-pusat perbelanjaan dibandingkan dengan dusun lainnya seperti swalayan, bengkel motor, warung internet, toko elektronik, toko pakaian serta percetakan. Berikut adalah peta Desa Arjowilangun:



Gambar 6. Peta Desa Arjowilangun
Sumber: Profil Desa Arjowilangun, 2017

b. Kondisi Demografis

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Arjowilangun tahun 2017, jumlah penduduk Desa Arjowilangun sebanyak 15.251 jiwa dengan jumlah 4.308 kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.622 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 7.629 jiwa. Penduduk Desa Arjowilangun memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani dan buruh tani dan sebagian besar penduduknya menjadi buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Desa Arjowilangun merupakan desa dengan penyumbang TKI terbesar di Kecamatan Kalipare dan merupakan satu dari dua desa yang menjadi kantong TKI terbesar di Kabupaten Malang pada tahun 2017.

Banyaknya penduduk Desa Arjowilangun yang menjadi buruh migran atau TKI dan mantan TKI, maka didirikanlah sebuah Koperasi Posdaya Purna TKI yang diberi nama Koperasi “Senang Hati” yang telah diresmikan oleh Bupati Malang pada tanggal 4 Juli 2012.

Desa Arjowilangun didominasi oleh suku atau etnis Jawa dan Madura dengan penduduk yang beragama Islam, Katolik, Kristen dan Hindu. Desa Arjowilangun juga menyimpan beberapa peninggalan bersejarah, seperti keris, tongkat, dan *pecut* atau cambuk, yang kini disimpan di Padepokan Eyang Demang Merthowijoyo yang berada di Dusun Panggang Lele. Desa Arjowilangun juga merupakan salah satu desa yang setiap tahunnya selalu mengadakan acara adat tahunan yaitu acara Bersih Desa. Acara bersih Desa dilaksanakan dalam rangka memperingati para leluhur desa yang diadakan pada Hari Jumat Pahing Bulan *Selo* (tahun Jawa) atau Bulan Dzulhijjah (Tahun Islam), yang ditandai dengan arak-arakan Mbah Leang Leong yang menjadi cirikhasnya. Desa Arjowilangun juga terdapat arca peninggalan zaman dahulu yaitu Punden yang kini berada di Dusun Barisan yang terletak di depan Kantor Desa Arjowilangun.

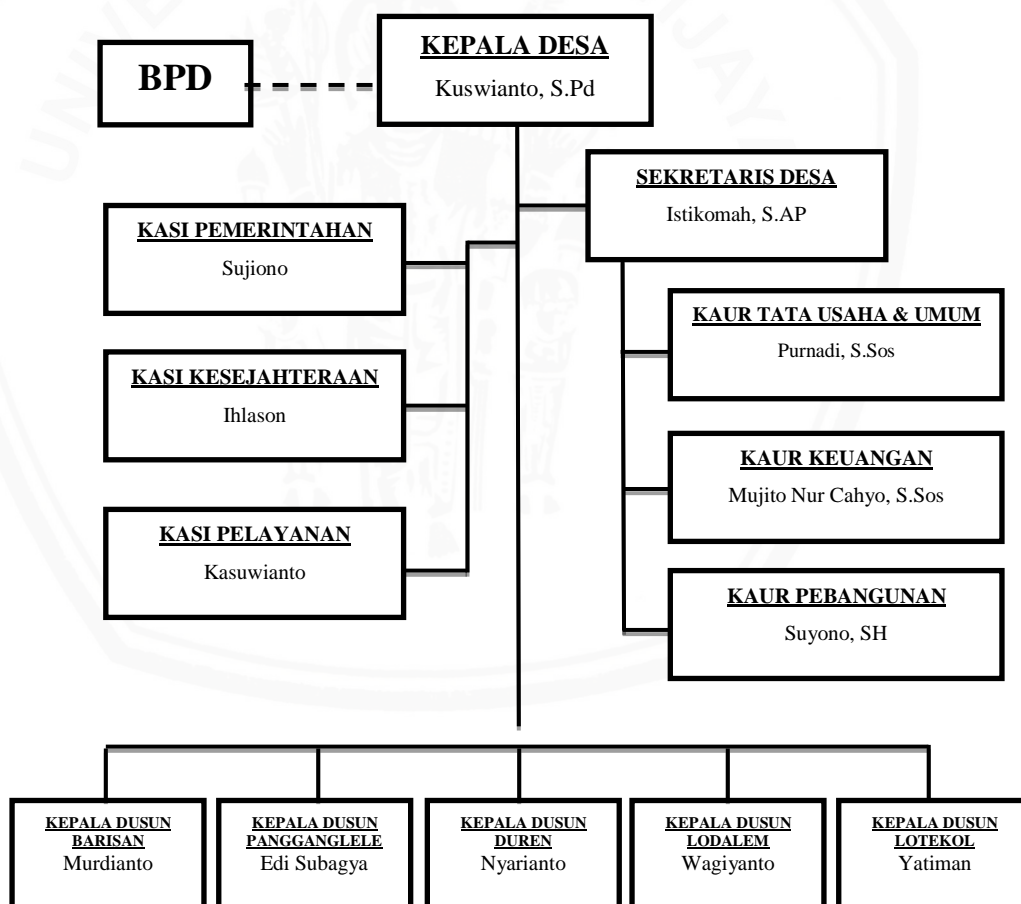
c. Pemerintahan Desa Arjowilangun

Pemerintahan Desa Arjowilangun terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala

Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Evaluasi dan Pelaporan, serta Kepala Dusun dan RT/RW. Pemerintah Desa Arjowilangun disusun dalam sebuah struktur organisasi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa sebagai berikut:

1) Struktur Organisasi Pemerintah Desa Arjowilangun

Pemerintah Desa Arjowilangun dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan mempunyai garis komando atau struktur organisasi



sebagai berikut:

Gambar 7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Arjowilangun

Sumber: Profil Desa Arjowilangun, 2017

2) Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Arjowilangun

Pemerintah Desa Arjowilangun dalam menjalankan pemerintahan di desa memiliki tugas, wewenang, dan fungsinya masing-masing. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa Arjowilangun:

a) Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan peraturan desa yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD setelah dievaluasi oleh bupati;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin sekretariat desa.
2. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan, dan laporan;
 - b. Pelaksana urusan keuangan;
 - c. Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

c) Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan urusan perlengkapan inventaris desa, rumah tangga desa, dan personel/perangkat desa;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
2. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan perlengkapan, inventaris desa, dan personel/perangkat desa;
- b. Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

d) Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

1. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menerima, menyimpan, mengeluarkan keuangan desa;
 - b. Penyelenggaraan pembukuan keuangan desa;
 - c. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksana penerimaan, penyimpanan, pengeluaran keuangan desa;
 - b. Penyelenggaraan pembukuan keuangan desa;
 - c. Pelaksana pertanggungjawaban keuangan desa;
 - d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pembangunan (Kuwowo)

1. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengelola, mengevaluasi data bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengembangkan perekonomian desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.

2. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksana pengembangan perekonomian desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

f) Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan (Kebayan)

1. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan pemungutan di bidang pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain;
- c. Melaksanakan tugas-tugas keagrariaan;
- d. Memberikan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- e. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;

- f. Melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa yang lain.
- 2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Pelayanan di bidang pemerintahan;
 - b. Pelaksana pemungutan bidang pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - c. Pelaksana tugas-tugas keagrariaan;
 - d. Pelaksana kependudukan dan catatan sipil;
 - e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

g) Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan (Modin)

- 1. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas:
 - a. Mengolah, mengumpulkan, mengevaluasi data bidang kesejahteraan;
 - b. Menyelenggarakan bimbingan dan pelayanan bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan dan memberikan pelayanan bidang sosial;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksana pengelolaan, pengumpulan dan evaluasi data bidang kesejahteraan;

- b. Penyelenggara bimbingan dan pelayanan bidang keagamaan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat;
- c. Penyelenggara bidang sosial;
- d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

h) Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan (Kepetengan)

1. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan pelayanan masyarakat terhadap bencana alam atau bencana lainnya;
- c. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

2. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara pembinaan dan pelayanan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. Pelayanan masyarakat terhadap bencana alam atau bencana lainnya;
- c. Penyelenggara kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

i) Tugas Kepala Dusun

1. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan pada bagian wilayah desa/dusun, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
2. Kepala Dusun harus berdomisili di dusun/lingkungan yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya.
3. Kepala Dusun mempunyai tugas:
 - a. Pembinaan wilayah dan kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan, pemuda dan olahraga;
 - b. Mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat setempat;
 - c. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional kewilayahan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - e. Pelaksana keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa;
 - f. Penyelenggara pembinaan kerukunan warga;
 - g. Membina dan meningkatkan partisipasi, swadaya, dan gotong-royong masyarakat;

- h. Penyelenggara penyuluhan kegiatan program-program pemerintah;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

B. Penyajian Data

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan keuangan desa. Artinya, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa

(ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, yang mana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

Tahun 2016, Kabupaten Malang memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 184,5 miliar yang dibagikan kepada 378 desa di Kabupaten Malang, yang pembagiannya menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek penting bagi sebuah desa untuk menjalankan program-program pemerintah desa, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana apabila ada partisipasi langsung dari masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa.

Berikut adalah gambaran secara singkat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun:

Tabel 2. Uraian Singkat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun

No.	KEGIATAN PENGELOLAAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan ADD Desa Arjowilangun	a. Melaksanakan Musrenbangdes yang dihadiri oleh seluruh lembaga desa dan perwakilan tokoh masyarakat

		b. Dalam Musrenbangdes menghasilkan RKPDes yang selanjutnya menjadi APBDes (dalam penyusunannya Desa didampingi oleh pendamping desa)
2.	Pencairan dan Penyaluran ADD Desa Arjowilangun	<p>a. Kepala Desa mengajukan RKPDes bersamaan dengan APBDes ke tingkat Kecamatan, kemudian akan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diverifikasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan dilampirkan dokumen-dokumen persyaratan.</p> <p>b. Pencairan dilakukan dalam dua tahap. Tahap I 40% dan Tahap II 60%</p> <p>c. Pencairan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diverifikasi menggunakan surat pengantar Camat dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan (baik pencairan Tahap I maupun Tahap II)</p> <p>d. Penyaluran dilakukan setelah dana ADD ada ditangan Pemerintah Desa, kemudian diadakan rapat untuk membagikan dana ADD sesuai dengan pos-pos yang melaksanakan kegiatan.</p>
3.	Pelaksanaan ADD Desa Arjowilangun	<p>a. Dana dibagikan kepada pos-pos atau lembaga yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam perencanaan</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan</p>
4.	Pembinaan dan Pengawasan ADD Desa	a. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pihak

	Arjowilangun	<p>Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan termasuk pembukuan, pembelanjaan, pengadaan material dan bukti pengeluaran)</p> <p>b. Secara tidak langsung, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD juga mengawasi, termasuk masyarakat</p>
5.	Pertanggung Jawaban dan Pelaporan ADD Desa Arjowilangun	<p>a. Pertanggungjawaban dilaksanakan oleh lembaga pelaksana kegiatan kepada PTPKD</p> <p>b. Kemudian, PTPKD membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk rekapitulasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>c. Pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban dengan menggunakan format aplikasi keuangan.</p> <p>d. Pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa pemasangan <i>banner</i> di depan Kantor Desa untuk menunjukkan besaran dan pengalokasian ADD di Desa Arjowilangun sebagai bentuk transparansi.</p>

Berdasarkan uraian singkat mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun di atas, maka dijelaskan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun secara terperinci, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, meliputi:

1) Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Perencanaan merupakan tahap paling awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penetapan hal-hal yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif, dalam hal ini adalah perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kegiatan perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun diawali dengan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh BPD, LPMD, Ketua Dusun, Ketua RT, PKK, Karangtaruna, dan perwakilan tokoh masyarakat, yang sebelumnya telah dilaksanakan musyawarah di tingkat dusun atau Musdus. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Tahap yang paling awal itu adalah Musrenbangdes, pada saat itu rapat dihadiri oleh tokoh, lembaga desa, LPMD, BPD, dan PKK, Karangtaruna, semua lembaga yang ada di Arjowilangun, yang sebelumnya sudah dilakukan Musdus oleh masing-masing dusun”. (wawancara pada 22 Februari 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Arlina selaku Ketua PKK Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Awalnya semua lembaga desa mengikuti Musrenbangdes di Kantor Desa termasuk juga PKK, didalam Musrenbangdes itu menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tersebut serta dananya”. (wawancara pada 28 Mei 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Pemerintah Desa Arjowilangun khususnya Kepala Desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang berlaku untuk satu tahun dan harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang wajib disusun oleh Kepala Desa pada awal masa pemerintahannya dan berlaku selama satu periode pemerintahan yaitu enam tahun. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Arjowilangun Tahun 2013-2019, pembangunan di Desa Arjowilangun dititikberatkan dari prioritas kebutuhan masyarakat yang telah dilakukan mulai dari penggalian gagasan sampai dengan tersusunnya urutan prioritas usulan dari Musyawarah Desa Perencanaan bersamaan dengan Musrenbangdes.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) direncanakan dan disusun pada saat Musrenbangdes, yang mana nantinya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kuswianto selaku Kepala Desa Arjowilangun sebagai berikut:

“Sebelumnya waktu Kepala Desa baru terpilih itu menyusun RPJMDes yang enam tahunan, lalu RKPDDes itu satu tahunan,

Musrenbangdes dan RKPDes itu bersamaan, jadi Musrenbangdes itu nantinya menghasilkan RKPDes. RKPDes itu nanti tujuannya menjadi APBDes”. (wawancara pada 22 Februari 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Dalam kegiatan Musrenbangdes, sebelumnya setiap lembaga desa merencanakan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, yang kemudian disusun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan diajukan ke Kecamatan untuk disetujui menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam penyusunan RKPDes dan APBDes, Desa didampingi oleh pendamping desa, yang mana pendamping desa berada dibawah pemerintahan Kementerian Desa (Kemendes). Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah untuk mendampingi desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga pendamping desa harus mengetahui semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Setelah RKPDes setiap sub-sub yang merencanakan pembangunan atau yang lainnya, setelah itu nanti diajukan ke kecamatan RKPDesnya sama pembuatan APBDes. Tapi itu juga dikawal dari pendamping kecamatan dan pendamping desa, dan pendamping kecamatan itu dia juga dari teknik sipil, yang digaji sendiri oleh pusat. Pendamping itu harus tau semua kegiatan yang di desa, misalnya pembangunan infrastruktur, pendamping harus mendampingi mulai dari pengukuran infrastruktur tersebut”. (wawancara pada 22 Februari 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Kegiatan Musrenbangdes dalam rangka membahas rangkaian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dijadikan sebagai sarana untuk mensosialisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) serta untuk menjangar

aspirasi dari pihak-pihak atau *stakeholders* terkait dengan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai wujud transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan Pemerintah Desa kepada lembaga-lembaga desa termasuk masyarakat. Masyarakat merupakan unsur penting yang harus dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), karena masyarakat dianggap lebih mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kuswianto selaku Kepala Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Dalam Musrenbangdes, masyarakat juga dilibatkan, karena merekalah yang tahu apa yang terjadi di lapangan, seperti jalan di daerah sana rusak dan sebagainya. Selain itu, aspirasi dan partisipasi masyarakat itu kan penting untuk keberhasilan pemerintahan desa. Kalau dalam Musrenbangdes, tidak semua masyarakat hadir, namun hanya perwakilan saja, yang mana aspirasi masyarakat itu ditampung ke dalam Musdus dahulu kemudian dibawa ke Musrenbangdes”. (wawancara pada 22 Februari 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bapak Afandi selaku masyarakat Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Dalam kegiatan Musrenbangdes itu kami masyarakat sebenarnya juga terlibat, karena yang dimusyawarahkan adalah tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang sebelumnya sudah ditampung pada Musdus. Tetapi dalam Musrenbangdes yang dihadirkan hanya perwakilan masyarakat saja”. (wawancara pada 28 Mei 2018 di Desa Arjowilangun)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes sangat penting, karena pada hakikatnya sebuah keputusan yang diambil harus berdasarkan kepentingan masyarakat. Melalui Musrenbangdes, masyarakat dapat

menyampaikan aspirasinya terhadap program atau kegiatan Pemerintah, terutama Pemerintah Desa karena masyarakat yang lebih mengetahui sejauh mana program atau kegiatan tersebut akan berdampak positif sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes di Desa Arjowilangun:



Gambar

Kegiatan Musrenbangdes Desa Arjowilangun

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

8.

Kegiatan Musrenbangdes tahun 2016 Desa Arjowilangun, yang ditunjukkan dengan gambar di atas, menunjukkan bahwa kegiatan Musrenbangdes Desa Arjowilangun dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Camat Kalipare, BPD, serta perwakilan lembaga desa yang terlibat.

2) Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Kegiatan Musrenbangdes menghasilkan Rancana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) sekaligus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDdes) yang didalamnya termasuk Rencana Anggaran Biaya

(RAB) Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah disepakati. Tahap selanjutnya adalah Kepala Desa mengajukan RKPDes bersamaan dengan APBDes ke tingkat Kecamatan yang didampingi oleh pendamping desa, kemudian akan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diverifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan dilampirkan dokumen-dokumen persyaratannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Mujito selaku Bendahara Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Setelah RKPDes itu kita mengajukan ke kecamatan, RKPDes sama pembuatan APBDes-nya, tetapi itu juga sudah dikawal dari pendamping desa. Setelah itu kecamatan memberikan ke bagian desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”. (wawancara pada 22 Februari 2018 di Kantor Desa Arjowilangun).

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dalam dua tahap pencairan yaitu Tahap I sebesar 40% dan Tahap II sebesar 60%. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diverifikasi dengan menggunakan surat pengantar Camat yang dilampiri dokumen-dokumen persyaratan seperti laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran sebelumnya, Laporan Penerimaan Pajak (LPP) tahun sebelumnya yang dihimpun di Kantor Kecamatan, APBDes tahun berjalan, RPJMDes dan RKPDes tahun berjalan, keputusan Kepala Desa tentang (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), fotocopy rekening kas desa, fotocopy NPWP Bendahara Desa, fotocopy KTP Kepala Desa dan

Bendahara Desa, serta kwitansi penerimaan yang di tanda tangani oleh Kepala Desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kuswianto selaku Kepala Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Pencairannya kalau ADD dua tahap, 40% kemudian 60%. Ketika dari kecamatan kemudian diajukan ke Dinas juga harus dilampirkan persyaratan seperti NPWP Bendahara Desa, fotocopy Kepala Desa dan Bendahara Desa, pengajuan kwitansi, dan lain-lain”. (wawancara pada 22 Februari 2018)

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II juga harus melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti laporan realisasi penggunaan Tahap I, fotocopy rekening kas desa, fotocopy NPWP Bendahara Desa, fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa serta kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun mengacu pada pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pendoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, hasil verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk surat pernyataan kemudian disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan cara transfer melalui Bank Jatim Cabang Kepanjen ke rekening kas desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Mujito selaku Bendahara Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Setelah diajukan ke Dinas, nantinya saya dan Kepala Desa bisa mencairkan itu di Bank Jatim Kepanjen yang sudah ditransfer ke rekening desa”. (wawancara pada 22 Februari 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Setelah pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II, diadakan rapat untuk membagikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan bidang-bidang atau pos-pos anggaran yang telah ditentukan baik kegiatan pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan, yang nantinya pihak-pihak pelaksananya akan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

3) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian terbesar dari rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), karena pelaksanaan merupakan realisasi dari seluruh rencana kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati dalam Musrenbangdes. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan harus melibatkan unsur-unsur terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi. Dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus memperhatikan hal-hal seperti penggunaan dana harus sesuai dengan rencana dan kegiatan dapat mencapai hasil yang memuaskan serta dapat diselesaikan tepat waktu, memanfaatkan tenaga

masyarakat desa untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka, kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan sasaran kegiatan untuk menghindari kecemburuan sosial, diperlukan dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan, dan akhir pelaksanaan kegiatan, serta setiap pembelian barang dan jasa dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bapak Kuswianto selaku Kepala Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Kalau ADD sudah cair, kemudian mengadakan rapat dan pembagian kepada pos-pos yang melaksanakan kegiatan, kemudian kegiatan yang dilakukan itu harus sesuai prosedur, harus sesuai peraturan dan harus sesuai dengan yang sudah direncanakan dan disepakati sebelumnya, agar nantinya hasilnya itu juga sesuai dengan yang diharapkan”. (wawancara pada 22 Februari 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan Bapak Mateus, selaku Ketua Karangtaruna Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Biasanya, kalau dana sudah turun ke desa, semua lembaga-lembaga seperti karangtaruna, PKK dan lainnya yang waktu itu mengikuti Musrenbangdes, melaksanakan musyawarah kembali sekaligus pembagian dana ADD tersebut sesuai yang direncanakan. Lalu setelah itu setiap lembaga masing-masing melaksanakan kegiatan yang direncanakan sebelumnya”. (wawancara pada 28 Mei 2018 di Desa Arjowilangun)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan pembangunan atau kegiatan pemberdayaan, yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) juga digunakan untuk tunjangan dan biaya operasional BPD. Selain itu, pelaksanaan kegiatan

juga harus melibatkan masyarakat desa karena masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa. Pemerintah Desa sekaligus pelaksana kegiatan wajib untuk menginformasikan kegiatan yang dilakukan beserta besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebagai bentuk transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat desa. Sebagai bentuk transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat desa tersebut, Pemerintah Desa memasang papan berupa *banner* yang diletakkan di tepi jalan di depan Kantor Desa Arjowilangun yang berisi besaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan realisasinya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun sebagai berikut:

“Pelaksanaan ADD juga melibatkan BPD karena anggaran ADD juga digunakan untuk membiayai operasional BPD itu sendiri. Masyarakat juga diikutsertakan, misal ketika membangun jalan masyarakat boleh ikut kerja, jadi masyarakat juga tau pembangunannya seperti apa. Kalau berkaitan dengan transparansi, ya itu ADD nya yang diterima berapa, digunakan untuk apa saja, semua dipasang di depan di pinggir jalan itu, biar masyarakat juga tau” (wawancara pada 22 Februari 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Pemerintah Desa Arjowilangun dalam pelaksanaannya berbasis partisipasi masyarakat dan transparansi. Pemerintah Desa berupaya mengajak masyarakat berperan langsung dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

4) Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan pembinaan dan pengawasan agar serangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan secara efektif. Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari pelaksanaan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, dalam hal ini pengawasan sebagai bentuk pengendalian dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan agar kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Arjowilangun sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat terhindar dari berbagai penyimpangan.

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan mulai awal kegiatan hingga akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tersebut. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa, PTPKD, Lembaga Desa, tokoh masyarakat, Camat, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kata lain semua *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait dalam rangkaian kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kuswianto selaku Kepala Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Untuk pengawasan sendiri dilakukan semua pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan ADD, sama halnya seperti Musrenbang. Jadi semua pihak yang terkait, lembaga desa dan tokoh masyarakat juga berhak memantau. Termasuk juga dari kecamatan dan dinas. Pengawasan serta pembinaan dari Dinas dan Kecamatan ini yang terpenting”. (wawancara pada 22 Februari 2018)

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Mujito selaku Bendahara Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Jadi, pengawasan dalam pelaksanaan ADD ini ya semua pihak yang terlibat termasuk masyarakat juga berhak ikut mengawasi jalannya kegiatan yang didanai oleh ADD ini. Jadi masyarakat ikut memantau juga pelaksanaan dilapangan seperti apa”. (wawancara pada 22 Februari 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait terutama dari Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mana pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan maupun terhadap pengelolaan keuangan termasuk pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah terkait.

5) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Rangkaian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, selanjutnya diakhiri dengan pertanggungjawaban dan

pelaporan. Pertanggungjawaban dan pelaporan dilakukan oleh Pemerintah Desa Arjowilangun agar pemerintah di atasnya dapat memantau dan mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun dilaksanakan oleh para pelaksana kegiatan yang membuat pertanggungjawaban kepada PTPKD, selanjutnya PTPKD menghimpun semua pertanggungjawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk rekapitulasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan pada semester pertama, semester kedua dan laporan di akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD itu wajib dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban para pelaksana kegiatan. Penyusunan LPJ sendiri saya dibantu Bendahara Desa dan Perangkat Desa yang lain yang kemudian LPJ itu dilaporkan secara berkala, yaitu laporan pertanggungjawaban semester 1, semester 2 dan laporan pertanggungjawaban seluruhnya di akhir”. (wawancara pada 22 Februari 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa laporan pertanggungjawaban melalui Camat yang kemudian disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana

Desa (ADD) dari Kepala Desa kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban tersebut menggunakan format aplikasi keuangan yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Mujito selaku Bendahara Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dibuat secara berkala, mulai dari pelaksana kegiatan membuat LPJ yang dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa melaporkan ke Kecamatan, lalu dari Kecamatan dilaporkan ke Dinas, kemudian nanti dari Dinas ke Bupati”. (wawancara pada 22 Februari 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Pemerintah Desa Arjowilangun juga melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Arjowilangun dengan cara transparan menunjukkan besaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan penggunaannya yang ditunjukkan dengan dibuatnya *banner* tentang rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diletakkan di depan Kantor Desa Arjowilangun. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Afandi selaku masyarakat Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Di depan balai desa ditunjukkan *banner* yang berisi rincian ADD, jadi masyarakat semua bisa lihat langsung, bisa tahu dana ADD yg diperoleh berapa dan yang digunakan berapa dan digunakan untuk apa saja”. (wawancara pada 28 Mei 2018 di Desa Arjowilangun)



Gambar 9. Banner besaran dan penggunaan ADD di Desa Arjowilangun

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun dapat dilihat pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumber Dana Desa Arjowilangun Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:

Tabel 3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes per Sumber Dana Desa Arjowilangun Tahun Anggaran 2016

No.	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA
1.	PENDAPATAN ALOKASI DANA DESA (ADD)	Rp 531.259.000	
2.	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>		Rp 335.032.500
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan		Rp 212.472.000
	Kegiatan Operasional Kantor Desa		Rp 76.758.500
	Kegiatan Operasional BPD		Rp 7.232.000

	Kegiatan Operasional RT/RW		Rp 31.730.000
	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa (APBDes)		Rp 6.840.000
3.	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>		<i>Rp 111.055.500</i>
	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup		Rp 9.243.000
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Masyarakat		Rp 46.205.000
	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa		Rp 55.607.500
4.	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>		<i>Rp 85.171.000</i>
	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban		Rp 11.603.000
	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga		Rp 11.696.000
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK		Rp 27.022.000
	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		Rp 19.550.000
	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini		Rp 15.300.000
JUMLAH BELANJA			Rp 531.259.000
SURPLUS (DEFISIT)			0

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun (olahan penulis)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 Desa Arjowilangun sebesar Rp 531.259.000,- digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp 335.032.500,- , Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 111.055.500,- , dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 85.171.000,-.

b. Hasil Pemberdayaan Masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pemberian dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan rincian 100% Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 30% untuk aparatur desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan publik. Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun, Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2016 sebesar Rp 531.259.000,- (*lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*), dialokasikan pada tiga bidang, yaitu Rp 335.032.500,- (*tiga ratus tiga puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*) digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Rp 111.055.500,- (*seratus sebelas juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*) digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Rp 85.171.000,- (*delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) digunakan untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Di Desa Arjowilangun sendiri, pada tahun 2016 dana ADD sebesar Rp 531.259.000,- digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti gaji Kepala Desa dan perangkat, untuk inventaris kantor juga. Selain itu, juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi hanya sebagian. Karena pembangunan infrastruktur lebih diutamakan dari dana DD. Terus juga untuk

kegiatan pembinaan kemasyarakatan seperti kegiatan PKK, Karangtaruna, pembinaan keagamaan dan lain-lain”. (wawancara pada 1 Maret 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Hal tersebut juga didukung dengan pendapat Bapak Kuswianto selaku Kepala Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Pada tahun 2016 Desa Arjowilangun mendapatkan dana ADD terbesar di Kecamatan Kalipare yaitu Rp 531.259.000,- yang mana dana ADD tersebut lebih digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan, selain untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan”. (wawancara pada 22 Februari 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Dalam pemberdayaan masyarakat, pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun pada tahun 2016, dapat dilihat dari pemberdayaan lingkungan berupa pembangunan fisik sarana dan prasarana yang termasuk ke dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat yang termasuk ke dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Adapun hasil-hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun tahun 2016 dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa juga digunakan untuk menunjang infrastruktur desa. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp

111.055.500,- (*seratus sebelas juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup di Desa Arjowilangun pada tahun 2016 salah satunya dapat dilihat dengan adanya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong, yaitu kegiatan gotong-royong warga desa dalam membangun tembok penahan tanah yang berfungsi untuk mencegah terjadinya tanah longsor, kegiatan membuat selokan (saluran air), serta kegiatan pemasangan lampu desa untuk penerangan jalan yang menunjang kegiatan masyarakat. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp 9.243.000</i>	<i>Rp 9.243.000</i>
Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 243.000	Rp 243.000
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 300.000	Rp 300.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun (olahan penulis)

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan

penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup sebesar Rp 9.243.000,- (*sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) yang digunakan untuk belanja barang dan jasa dengan rincian belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, serta belanja makanan dan minuman rapat. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup di Desa Arjowilangun:



Gambar 10. Kegiatan Membangun Tembok Penahan Tanah

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016
Desa Arjowilangun



Gambar 11. Kegiatan Membuat Selokan (Saluran Air)
Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun



Gambar 12. Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan
Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Masyarakat

Kegiatan pemeliharaan sarana-prasarana masyarakat di Desa Arjowilangun pada tahun 2016 adalah pemeliharaan pembangunan Padepokan (sanggar) Eyang Demang Merthowijoyo yang ada di

Dusun Panggang Lele. Padepokan tersebut sebagai tempat disimpannya beberapa peninggalan bersejarah yang digunakan masyarakat Desa Arjowilangun pada acara adat Bersih Desa yang dilaksanakan setiap tahunnya. Pemeliharaan dan pembangunan padepokan tersebut merupakan salah satu wujud dalam menjaga adat istiadat yang masih dianut masyarakat di Desa Arjowilangun. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Yudhana selaku masyarakat Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Padepokan Eyang Demang Merthowijoyo atau yang biasa kita sebut sanggar ini memang salah satu yang masih dirawat di Arjowilangun. Karena pada acara-acara adat misalnya pada iring-iringan leyang leyong pada Bersih Desa masih digunakan untuk ritual dan menyimpan benda-benda peninggalan yang nanti digunakan di acara adat”. (wawancara pada 28 Mei 2018 di Desa Arjowilangun)

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana-prasarana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Masyarakat

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp 17.346.850</i>	<i>Rp 17.346.850</i>
Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 25.000	Rp 25.000
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 121.850	Rp 121.850
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	Rp 16.200.000	Rp 16.200.000
Belanja Honorarium Tim Panitia	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000

Belanja Modal	Rp 28.858.150	Rp 28.858.150
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	Rp 28.858.150	Rp 28.858.150

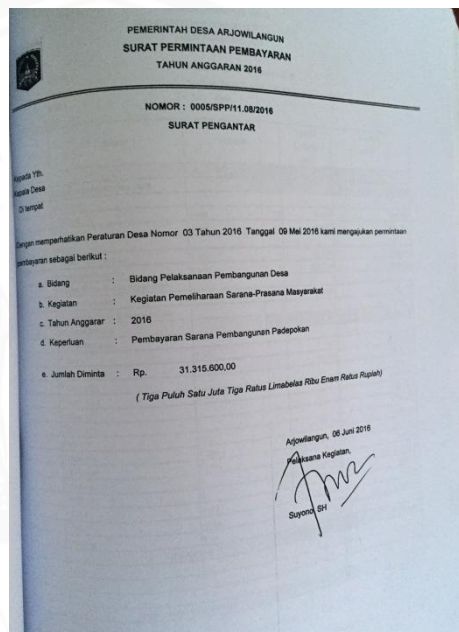
Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun (olahan penulis)

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana-prasarana sebesar Rp 17.346.850,- (*tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) yang digunakan untuk belanja barang dan jasa dengan rincian belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja jasa upah tenaga kerja, serta belanja honorarium tim panitia, dan sebesar Rp 28.858.150,- (*dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah*) digunakan untuk belanja modal pengadaan bangunan bersejarah.

Berikut pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- a. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana direncanakan oleh lembaga desa pada saat Musrenbangdes yang kemudian menjadi RKPDes berpedoman pada RPJMDes
- b. Pencairan dan Penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana diterima oleh

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sebelumnya TPK harus membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diserahkan kepada PTPKD yang memuat besaran dana yang akan dicairkan. Selanjutnya PTPKD membuat surat pengantar pencairan dana ADD, sebagai berikut:



Gambar 13. Surat Pengantar Pencairan Dana ADD yang dikeluarkan oleh PTPKD

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

- c. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana oleh TPK dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana-prasarana di Desa Arjowilangun:



Gambar 14. Padepokan Eyang Demang Merthowijoyo

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

- d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan sarana-prasarana dilakukan oleh Inspektorat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat yang didampingi oleh pendamping desa.
- e. Pertanggung Jawaban dan Pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana dilakukan oleh TPK kepada PTPKD dengan memberikan rincian belanja serta penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran. Berikut adalah contoh rincian belanja untuk kegiatan pemeliharaan sarana-prasarana, sebagai berikut:

PEMERINTAH DESA ARJOWILANGUN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2016

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Masyarakat

No	Perkiraan	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Supaya SH 00118WV11.08.2016	-	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000,00
2	Supaya SH 00118WV11.08.2016	-	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	82.450,00
3	Supaya SH 00118WV11.08.2016	-	Upah Tukang 10 Or @ 75.000	750.000,00
4	Supaya SH 00228WV11.08.2016	-	Upah Pekerja 10 Or @ 80.000	800.000,00
5	Supaya SH 00228WV11.08.2016	-	Honor Pelaksanaan Kegiatan 1 Or @ 500.000	500.000,00
6	Edi Subagya 00228WV11.08.2016	-	Honor Pengawas 1 Or @ 500.000	500.000,00
7	Supaya SH 00228WV11.08.2016	-	Belanja Material Semen Kayu 5-15 Kayu 8x12 Kayu 4x6 Kayu 2x4 Jernam, Gering, Subangan, P1	28.831.550,00
8	Supaya SH 00228WV11.08.2016	-	Pasir	2.228.800,00
Total				31.318.800,00

Buku bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeliharaan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Arjowilangun, 06 Juni 2016
Pejabat Desa
[Signature]
Supaya, SH

LAMBIK 1

**Gambar 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana**

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa
Arjowilangun

c. Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa

Kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa di Desa Arjowilangun pada tahun 2016 adalah membangun gapura sebagai tanda batas Desa Arjowilangun. Pembangunan gapura dilaksanakan untuk memperbaiki gapura dan tanda batas desa yang sudah ada sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kuswianto selaku Kepala Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Salah satu pembangunan dan perawatan infrastruktur yang dilakukan adalah perbaikan gapura desa. Pura Gapura itu kan sebenarnya sudah ada dulunya, tetapi keadaannya sudah rapuh. Sehingga tahun 2016 dilakukan pembangunan gapura desa sebagai tanda batas masuk Desa Arjowilangun”.

(wawancara pada 1 Maret 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pembangunan Gapuran dan Tanda Batas Desa

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp 17.471.000</i>	<i>Rp 17.471.000</i>
Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 458.000	Rp 458.000
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 143.000	Rp 143.000
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	Rp 15.870.000	Rp 15.870.000
Belanja Honorarium Tim Panitia	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
<i>Belanja Modal</i>	<i>Rp 38.136.500</i>	<i>Rp 38.136.500</i>
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	Rp 38.136.500	Rp 38.136.500

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun (olahan penulis)

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa sebesar Rp 17.471.000,- (*tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) untuk belanja barang dan jasa dengan rincian belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja jasa upah tenaga

kerja, serta belanja honorarium tim panitia, dan sebesar Rp 38.136.500,- (*tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*) digunakan untuk belanja modal. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa di Desa Arjowilangun:



Gambar 16. Gapura Masuk Desa Arjowilangun

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa juga digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp 85.171.000,-

(delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban di Desa Arjowilangun tahun 2016 adalah kegiatan yang dilakukan oleh LINMAS (Perlindungan Masyarakat) Desa Arjowilangun yaitu pengamanan dalam kegiatan-kegiatan desa seperti acara bersih desa, karnaval, dan kegiatan desa lainnya. Selain itu LINMAS juga mengadakan rapat rutin LINMAS, serta pembelian alat-alat penunjang kegiatan LINMAS seperti Handy Talky (HT), senter, lampu dan baterai. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp 11.603.000</i>	<i>Rp 11.603.000</i>
Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 103.000	Rp 103.000
Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 300.000	Rp 300.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000

Belanja Perjalanan Dinas	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
--------------------------	--------------	--------------

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp 11.603.000,- (*sebelas juta enam ratus tiga ribu rupiah*) digunakan untuk belanja barang dan jasa dengan rincian belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik/baterai/lampu, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber dan belanja perjalanan dinas. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban di Desa Arjowilangun:



Gambar 17. Pembinaan LINMAS

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

b. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga di Desa Arjowilangun pada tahun 2016 adalah kegiatan Karangtaruna termasuk rapat rutin Karangtaruna dan pembelian seragam Karangtaruna. Karangtaruna membantu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan desa seperti bersih desa, karnaval desa dan kegiatan olahraga, seperti pembinaan sepak bola. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kuswianto selaku Kepala Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga di Desa Arjowilangun dibantu oleh Karangtaruna desa yang aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan. Seperti kegiatan tournament sepak bola, tenis meja, voli dan sebagainya. selain itu karangtaruna desa juga membantu pelaksanaan karnaval dan bersih desa”. (wawancara pada 1 Maret 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Penyataan di atas didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Mateus selaku Ketua Karangtaruna Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Karangtaruna di Desa Arjowilangun memang tergolong aktif. Setiap tahunnya kami melaksanakan berbagai kegiatan yang diikuti tiap dusun ataupun masyarakat luar seperti tournament olahraga bola voli, sepak bola, tenis meja. Selain itu kami juga membantu pelaksanaan Bersih Desa dan karnaval desa pada peringatan kemerdekaan”. (wawancara pada 28 Mei 2018 di Desa Arjowilangun)

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp 11.696.000</i>	<i>Rp 11.696.000</i>
Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 596.000	Rp 596.000
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 300.000	Rp 300.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 3.800.000	Rp 3.800.000

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga sebesar Rp 11.696.000,- (*sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) yang digunakan untuk belanja barang dan jasa dengan rincian belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja pakaian dinas dan atributnya, dan belanja perjalanan dinas. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga di Desa Arjowilangun:



Gambar 18. Kegiatan Pembinaan Sepak Bola Desa Arjowilangun

Sumber: Dokumentasi Karangtaruna

c. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dan PKK di Desa-Arjowilangun adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan diadakan oleh PKK Desa Arjowilangun pada tahun 2016. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah pertemuan rutin PKK yang diadakan satu bulan sekali, sosialisasi bank sampah, pembinaan koperasi wanita, pelatihan melukis kerudung, pembinaan PLKB, pelatihan membuat kue dari singkong, pembinaan tentang kanker serviks, pelatihan membuat hantaran, sosialisasi kesehatan tentang demam berdarah, pelatihan olah pangan, dan kegiatan kewirausahaan aneka keripik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Kalau kegiatan PKK memang setiap tahunnya memang mengadakan berbagai pelatihan dan sosialisasi. Biasanya yang mengadakan adalah dari pusat atau dari kecamatan. Selain itu, PKK setiap bulannya juga mengadakan pertemuan rutin yang membahas program-program PKK”. (wawancara pada 1 Maret 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Pernyataan di atas didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Arlina selaku Ketua PKK Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Kegiatan PKK dilaksanakan setiap bulan yaitu pertemuan rutin PKK yang diadakan di Balai Desa. Selain itu, PKK juga mengadakan berbagai pelatihan dan sosialisasi. Kalau pelatihan biasanya kita mendatangkan orang-orang yang memang ahli pada bidangnya. Kalau sosialisasi biasanya kita didatangi ataupun mengundang narasumber-narasumber”. (wawancara pada 28 Mei 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk

pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK

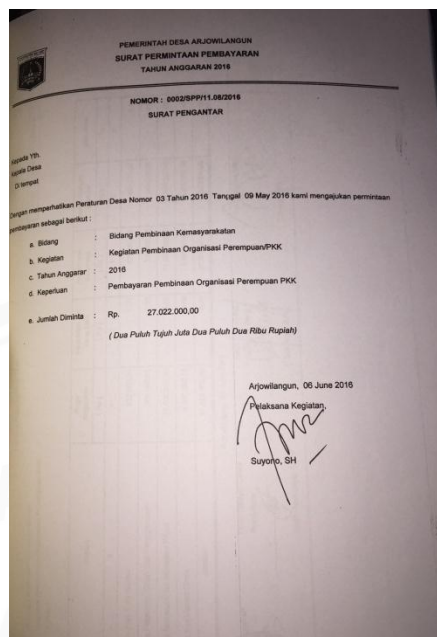
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp 27.022.000</i>	<i>Rp 27.022.000</i>
Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 622.000	Rp 622.000
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 300.000	Rp 300.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 21.600.000	Rp 21.600.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

Berdasarkan Tabel 9 di atas, dapat diketahui bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK sebesar Rp 27.022.000,- (*dua puluh tujuh juta dua puluh dua ribu rupiah*) yang digunakan untuk belanja barang dan jasa dengan rincian belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja perjalanan dinas.

Berikut pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- a. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kegiatan Pembinaan PKK direncanakan oleh lembaga desa pada saat Musrenbangdes yang kemudian menjadi RKPDes berpedoman pada RPJMDes
- b. Pencairan dan Penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kegiatan Pembinaan PKK diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sebelumnya TPK harus membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diserahkan kepada PTPKD yang memuat besaran dana yang akan dicairkan. Selanjutnya PTPKD membuat surat pengantar pencairan dana ADD, sebagai berikut:



Gambar 19. Surat Pengantar Pencairan Dana ADD yang dikeluarkan oleh PTPKD

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

- c. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK oleh TPK dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK di Desa Arjowilangun:



Gambar 20. Kegiatan Pertemuan Rutin PKK

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun



Gambar 21. Kegiatan Sosialisasi Bank Sampah

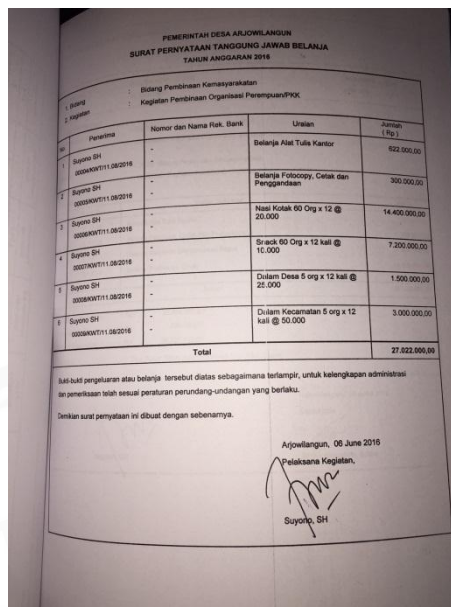
Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun



Gambar 22. Kegiatan Pelatihan Membuat Hantaran

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

- d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK dilakukan oleh Inspektorat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat yang didampingi oleh pendamping desa.
- e. Pertanggung Jawaban dan Pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK dilakukan oleh TPK kepada PTPKD dengan memberikan rincian belanja serta penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran. Berikut adalah contoh rincian belanja untuk kegiatan pembinaan PKK, sebagai berikut:




PEMERINTAH DESA ARJOWILANGUN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2016

Bidang : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kegiatan : Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/POK

No	Parafirma	Nomor dan Nama Rik, Blank	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Suyono SH 00200000711.08/2016	-	Belanja Alat Tulis Kantor	522.000,00
2	Suyono SH 00200000711.08/2016	-	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengiriman	300.000,00
3	Suyono SH 00200000711.08/2016	-	Nasi Kotak 60 Org x 12 @ 20.000	14.400.000,00
4	Suyono SH 00200000711.08/2016	-	Snack 60 Org x 12 kali @ 15.000	7.200.000,00
5	Suyono SH 00200000711.08/2016	-	Dulam Desa 5 org x 12 kali @ 25.000	1.500.000,00
6	Suyono SH 00200000711.08/2016	-	Dulam Kecamatan 5 org x 12 kali @ 50.000	3.000.000,00
Total				27.922.000,00

Keti-hati pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Arjowilangun, 06 June 2016
Pelaksana Kegiatan,

Suyono, SH

Gambar 23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/POK
Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

d. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama di Desa Arjowilangun tahun 2016 adalah kegiatan pengajian bersih desa serta kegiatan keagamaan lainnya serta kegiatan adat istiadat. Selain itu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2016 juga digunakan untuk pemberian insentif guru TPQ sebesar Rp 150.000 per-tahun kepada 54 guru TPQ di Desa Arjowilangun. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan pembinaan umat beragama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan Pembinaan Umat Beragama

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp 19.550.000</i>	<i>Rp 19.550.000</i>
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 200.000	Rp 200.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 5.150.000	Rp 5.150.000
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana-Prasarana	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

Berdasarkan Tabel 10 di atas, dapat dilihat bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan pembinaan umat beragama sebesar Rp 19.550.000,- (*sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) yang digunakan untuk belanja barang dan jasa dengan rincian belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, dan belanja pemeliharaan bangunan, taman, dan sarana-prasarana. Berikut adalah dokumentasi

pelaksanaan kegiatan pembinaan umat beragama di Desa Arjowilangun:



Gambar 24. Pengajian pada Bersih Desa Arjowilangun
Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun



Gambar 25. Kegiatan Keagamaan dan adat istiadat pada Bersih Desa Arjowilangun
Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun



Gambar 26. Pemberian Insentif Kepada Guru TPQ oleh Kepala Desa Arjowilangun

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

e. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Arjowilangun pada tahun 2016 adalah bantuan untuk pembinaan dan pelatihan guru PAUD di Desa Arjowilangun. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan PAUD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kegiatan PAUD

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp 15.300.000</i>	<i>Rp 15.300.000</i>
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 300.000	Rp 300.000
Belanja Makanan dan Minuman	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000

Rapat		
Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun

Berdasarkan Tabel 11 di atas, dapat diketahui bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PAUD sebesar Rp 15.300.000,- (*lima belas juta tiga ratus ribu rupiah*) yang digunakan untuk belanja barang dan jasa dengan rincian belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja bahann praktek dan pelatihan. Berikut adalah dokumentasi pemberian bantuan kepada Guru PAUD dalam rangka pelaksanaan kegiatan PAUD:



Gambar 27. Pemberian Bantuan kepada Guru PAUD oleh Kepala Desa Arjowilangun

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban APBDes 2016 Desa Arjowilangun

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahap perencanaan, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan, memunculkan faktor yang dapat mendukung maupun faktor yang dapat menghambat keberhasilan rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun yang akan datang, sehingga proses pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dapat tercapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Berikut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang:

a. Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Faktor yang mendukung tingkat keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1) Peraturan yang Jelas

Peraturan atau regulasi merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan, termasuk peraturan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang telah dibuat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, akan memudahkan Pemerintah Desa dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahap perencanaan, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan, serta tujuan, besaran, sasaran, hingga indikator keberhasilan Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan yang telah dibuat akan memudahkan Pemerintah Desa maupun tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dalam pengelolaannya dapat terarah dan terstruktur serta meminimalisir penyelewengan dalam pengelolaannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kuswianto selaku Kepala Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Yang mendukung dalam prosesnya ADD itu yang utama adalah adanya peraturan yang jelas dari pemerintah, dari perencanaannya, tahap pencairannya, pelaporannya semua sudah diatur dan ada peraturan dan undang-undangnya. Jadi desa dan tim pelaksana ADD itu sudah punya acuan jadi tidak bingung”. (wawancara pada 1 Maret 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ditetapkan merupakan faktor yang mendukung dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) di Desa Arjowilangun. Peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta didukung dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Peraturan inilah yang digunakan Pemerintah Desa Arjowilangun sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2) Fasilitas/Sarana-Prasarana

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Arjowilangun didukung dengan adanya fasilitas atau sarana-prasarana bangunan kantor desa dan inventaris kantor yang memadai seperti komputer, *printer*, dan fasilitas yang lain yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan adanya fasilitas bangunan kantor desa dan inventaris kantor yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan desa. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bapak Kuswianto selaku Kepala Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan di Kantor Desa dibutuhkan inventaris kantor yang lengkap, seperti komputer, ATK yang lengkap, yang nantinya untuk pelayanan kepada masyarakat itu pun menjadi mudah. Sangat membantu

dalam pembuatan surat-menyurat. Selain itu komputer untuk menyimpan data-data, jadi ketika ingin mencari data itu juga mudah”. (wawancara pada 1 Maret 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Berdasarkan pernyataan Bapak Kuswianto selaku Kepala Desa Arjowilangun tersebut, dapat diketahui bahwa dengan adanya inventaris kantor yang lengkap dan memadai, dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat. Inventaris kantor yang memadai juga mendukung dalam hal pembuatan laporan-laporan kegiatan yang dibuat oleh Perangkat Desa, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut didukung dengan pendapat Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun sebagai berikut:

“Fasilitas kantor seperti komputer itu juga sangat membantu kami (perangkat desa) dalam pembuatan laporan-laporan. Jika tidak ada komputer, printer, dan sebagainya nanti akan menyulitkan kami, dan akan menghambat pembuatan laporan. Oleh karena itu, fasilitas yang ada selalu kami jaga agar tidak rusak dan menghambat pelaksanaan pemerintahan, dan kami juga meningkatkan fasilitas-fasilitas yang masih kurang agar pelayanan ke masyarakat juga maksimal”. (wawancara pada 1 Maret 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Berdasarkan pernyataan Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun di atas, dapat diketahui bahwa inventaris kantor mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Desa

Arjowilangun akan menjaga dan meningkatkan fasilitas yang ada di Kantor Desa untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Faktor yang menghambat tingkat keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam suatu kegiatan. Sumber Daya Manusia, dalam hal ini adalah aparatur atau perangkat desa, memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahap perencanaan, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan. Perangkat Desa Arjowilangun mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti kesulitan dalam mengoperasikan komputer maupun dalam penyusunan laporan-laporan kegiatan, khususnya dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut didukung dengan pernyataan Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Penghambat yang utama itu adalah SDM. Perangkat yang tidak mampu itu akan kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya. Tidak bisa menggunakan komputer atau laptop itu kan yang membuat menghambat, karena perangkat sendiri itu latar belakang pendidikannya berbeda-beda, ada yang sarjana, ada yang SMA. Jadi dalam mengerjakan tugasnya kadang masih meminta bantuan ke rekannya begitu. Tetapi kan tidak mungkin langsung diberhentikan begitu saja”. (wawancara pada 1 Maret 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Berdasarkan pernyataan Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun tersebut, kemampuan Perangkat Desa di Desa Arjowilangun ditentukan oleh latar belakang pendidikan yang berbeda-beda yang berpengaruh terhadap kemampuannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Selain itu, Sumber Daya Manusia yang berpengaruh dalam rangkaian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pendamping desa yang mempunyai tugas mendampingi desa dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pendamping Desa Arjowilangun dapat menghambat rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena pendamping desa yang pasif serta tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa Arjowilangun. Selain itu, pendamping desa juga tidak bekerja sesuai dengan kemampuannya, sehingga pendamping desa yang tidak mau bekerja keras akan menghambat Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Pendamping desa yang latar belakang pendidikannya bukan dari teknik sipil atau bukan dari lulusan administrasi seperti ini akan menghambat kalau dia tidak mau belajar untuk menguasai

pekerjaannya karena tidak sesuai dengan bidangnya. Tapi jika dia mau belajar, pasti dia mampu. Selain itu ada juga pendamping yang tidak pernah ikut andil dalam kegiatan desa, dia hanya meng-copy data, hanya meminta data, seperti itu yang malah merugikan ya bukannya membantu perangkat desa”. (wawancara pada 1 Maret 2018)

Berdasarkan pernyataan Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun di atas, dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia seperti Perangkat Desa serta pendamping desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam hal ini adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga kemampuan Perangkat Desa dan pendamping desa yang terbatas dapat menghambat rangkaian kegiatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun.

2) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban atau laporan realisasi kegiatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari sebuah kegiatan, dalam hal ini adalah kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam Alokasi Dana Desa (ADD) karena laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya akan menjadi syarat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran selanjutnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun, sebagai berikut:

“Dalam penyusunan laporan seperti ini, yang menyebabkan terhambatnya penyusunan laporan APBDes, itu dari sub-sub bidang yang melaksanakan kegiatan seperti PKK, Karangtaruna dan sebagainya itu. Seperti ini, saya memberikan waktu satu bulan misalnya untuk menyelesaikan yang kurang-kurang, tapi nyatanya bisa lebih dari satu bulan. Nanti sudah dikumpulkan ke saya pun juga masih ada yang kurang, kurang tanda tangan, kwitansinya tidak ada, ya seperti itu. Seharusnya laporan ini bisa selesai sekarang tapi karena hal-hal seperti itu yang membuat tidak selesai tepat waktu”. (wawancara pada 1 Maret 2018 di Kantor Desa Arjowilangun)

Berdasarkan pernyataan Ibu Istikomah selaku Sekretaris Desa Arjowilangun di atas, dapat diketahui bahwa organisasi/lembaga yang melaksanakan kegiatan seperti PKK, Karangtaruna, dan lembaga desa lainnya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu tersebut dapat menghambat penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes.

C. Analisis Data

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Dalam menjalankan sebuah organisasi pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, diperlukan aspek-aspek pendukung yang akan mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang telah direncanakan. Salah satu aspek yang penting untuk mendukung terlaksananya suatu program dan kegiatan adalah aspek keuangan atau dana, oleh karena itu pengelolaan keuangan dalam

rangka pelaksanaan program dan kegiatan harus diperhatikan. Pengelolaan keuangan dalam suatu pelaksanaan program atau kegiatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang dilakukan secara berurutan.

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, meliputi:

1) Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Prinsip-prinsip administrasi yang berlaku secara umum adalah prinsip POAC sebagaimana yang dikemukakan oleh Terry (2009:17-19), bahwa perencanaan atau *planning* adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat apa saja harus dikerjakan dan metode-metode yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada dasarnya suatu perencanaan adalah penetapan sasaran atau tujuan dan pengembangan alternatif terpilih untuk tindakan mendatang guna mencapai sasaran yang telah ditentukan tersebut.

Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan bagian dari terlaksananya kemandirian desa. Desa harus dapat merencanakan kegiatan beserta dengan anggaran dananya dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan desa dan masyarakat desa. Suatu perencanaan sangat penting dilakukan Pemerintah Desa karena dari kegiatan perencanaan itu lah Pemerintah Desa dapat mengatur, mengarahkan dan mengurus segala urusan desa sesuai dengan

kewenangannya. Perencanaan desa akan semakin memperkuat hak dan kewajiban desa serta mengoptimalkan sumber daya desa sebagai kekuatan utama membangun desa.

Perencanaan desa yang dilakukan pada Musrenbangdes adalah perencanaan tahunan desa yang akan menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sekaligus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang di dalamnya termasuk perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut dipertegas dengan adanya Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa diawali dengan proses perencanaan, yang mana perencanaan diawali dengan Musyawarah Desa (Musrenbangdes) yang merupakan forum pertemuan musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Lembaga Desa dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk membahas perencanaan APBDes dan RKPDDes yang merupakan hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun yang akan datang.

Kegiatan perencanaan atau Musrenbangdes, termasuk perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara partisipatif yang melibatkan perwakilan masyarakat desa. Pemerintah Desa Arjowilangun mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu melaksanakan Musrenbangdes yang

dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh BPD, Lembaga Desa, PKK, Karang Taruna, Ketua RT, serta tokoh masyarakat. Dalam Musrenbangdes membahas rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana penggunaannya disesuaikan dengan prioritas kebutuhan desa. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

2) Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Setelah melakukan perencanaan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Desa melakukan pengajuan ke tingkat pemerintahan di atasnya untuk mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa Arjowilangun dalam pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memenuhi persyaratan dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), seperti yang dijabarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

pada poin Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2. Tahap II pada Bulan Juni sebesar 60% (enam puluh per seratus).

Mekanisme pencairan ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diverifikasi dengan menggunakan surat pengantar Camat dengan dilampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

3. Pencairan ADD tahap I:
 - a) Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan format aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - b) LPP Desa tahun sebelumnya yang dihimpun di Kantor Kecamatan;
 - c) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 - d) RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan PTPKD;
 - f) Fotokopi rekening kas Desa rangkap 3 (tiga);
 - g) Fotokopi NPWP Bendahara Desa rangkap 3 (tiga);

- h) Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa masing-masing rangkap 3 (tiga);
- i) Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga) yang asli bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);

4. Pencairan ADD tahap II:

- a) Laporan realisasi penggunaan Tahap I;
- b) Fotokopi rekening kas Desa rangkap 3 (tiga);
- c) Fotokopi NPWP Bendahara Desa rangkap 3 (tiga);
- d) Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa masing-masing rangkap 3 (tiga);
- e) Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga) yang asli bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Hasil verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk surat pernyataan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyalurkan ADD dengan cara transfer melalui Bank Jatim Cabang Kepanjen ke rekening kas desa dengan dilampirkan:

- 1. Fotokopi rekening kas desa rangkap 2 (dua);
- 2. Fotokopi NPWP Bendahara Desa rangkap 2 (dua);
- 3. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa masing-masing rangkap 2 (dua);

4. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua) yang asli bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun dilakukan dalam dua tahap pencairan yaitu 40% pada Tahap I dan 60% pada Tahap II. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diverifikasi dengan menggunakan surat pengantar Camat yang dilampiri dengan dokumen-dokumen persyaratan. Sedangkan, pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II juga harus melampirkan dokumen-dokumen persyaratan termasuk laporan realisasi pada Tahap I. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bendahara Desa Arjowilangun.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun sudah dilakukan sesuai dengan prosedur mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang tercantum dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

3) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Pelaksanaan atau implementasi merupakan sebuah tindakan untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah disepakati dalam Musrenbangdes. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dalam pelaksanaan kegiatan hal-hal yang diperhatikan adalah:

1. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu;
2. Memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka;
3. Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial;
4. Perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan;
5. Setiap pembelian barang dan jasa dikenakan pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun, selain digunakan untuk operasional Perangkat Desa, juga digunakan

untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan. Hal tersebut sesuai dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertera pada Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pada poin 3 dijelaskan selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, Alokasi Dana Desa (ADD), salah satunya digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan dan dapat digunakan untuk menunjang infrastruktur.

Selain itu pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun juga melibatkan masyarakat desa yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa. Pemerintah Desa Arjowilangun juga melibatkan masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk transparansi Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Arjowilangun, bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun dalam pelaksanaannya untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

4) Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Pembinaan dan pengawasan dilakukan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan. Pembinaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan agar serangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan efektif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Terry (2009:18), yang mengatakan bahwa pengawasan atau pengendalian dilakukan untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, dalam hal ini adalah pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) . Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari pelaksanaan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pembinaan dan pengawasan dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban di Desa Arjowilangun dilakukan oleh Kepala Desa, PTPKD, Lembaga Desa serta tokoh masyarakat sekaligus Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal tersebut sesuai dengan

pernyataan Kepala Desa Arjowilangun, bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat melakukan pengawasan.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada poin H pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui salah satunya adalah pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan maupun terhadap pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah terkait, dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa, Camat, dan Inspektorat Daerah.

5) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Pertanggungjawaban dan pelaporan berkaitan dengan pemberian informasi kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sebuah pekerjaan yang dilaksanakan. Melalui pelaporan pimpinan dan bawahannya menjamin bahwa dirinya terinformasi. Pelaporan dilakukan untuk melaporkan sesuatu sesuai yang dihasilkan atau sesuai yang dijalankan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Dengan

pelaporan yang benar, pimpinan mempunyai gambaran mengenai keadaan suatu kegiatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dilakukan oleh Pemerintah Desa Arjowilangun agar pemerintahan di atasnya dapat memantau dan mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun. Pertanggungjawaban dan pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang membuat pertanggungjawaban kepada PTPKD, kemudian PTPKD menghimpun semua pertanggungjawaban yang dibuat oleh pelaksana kegiatan kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk rekapitulasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat persemester yaitu semester satu dan semester kedua dalam bentuk laporan realisasi yang nantinya menjadi laporan akhir dalam bentuk laporan pertanggungjawaban APBDes.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada poin G pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dijelaskan mengenai pertanggungjawaban dan pada poin H pengendalian yang dijelaskan mengenai pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Hasil Pemberdayaan Masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Menurut Adi (2008:83-84), pemberdayaan sebagai sebuah program memiliki tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD), sesuai dengan teori tersebut karena dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan diantaranya digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan dan dapat digunakan untuk menunjang infrastruktur.

1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Desa Arjowilangun mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 untuk kegiatan pembangunan desa dalam rangka menunjang infrastruktur desa. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Arjowilangun melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur desa

berupa kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup yang terdiri dari kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong, membangun tembok penahan tanah, kegiatan membuat selokan (saluran air) serta kegiatan pemasangan lampu desa. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana-prasarana masyarakat berupa pemeliharaan pembangunan Padepokan (sanggar) Eyang Demang Merthowijoyo dan kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa.

Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur di Desa Arjowilangun tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hogan dalam Adi (2008:86) yaitu proses pemberdayaan yang terjadi tidaklah berhenti pada satu titik tertentu, tetapi sebagai upaya berkesinambungan untuk meningkatkan daya yang ada. Jadi pemeliharaan dan pembangunann infrastruktur di Desa Arjowilangun dilaksanakan terus menerus setiap tahunnya untuk memelihara dan membangun infrastruktur yang ada. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur di Desa Arjowilangun tersebut juga sesuai dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yaitu selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk menunjang infrastruktur.

2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Desa Arjowilangun mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, selain untuk pembangunan desa juga dialokasikan untuk pembinaan kemasyarakatan. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan melaksanakan kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban berupa kegiatan pembinaan LINMAS, kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga berupa kegiatan Karangtaruna, kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK berupa sosialisasi dan pelatihan kepada PKK dan masyarakat, kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama berupa kegiatan pengajian serta pemberian insentif kepada guru TPQ, dan kegiatan PAUD berupa bantuan pembinaan dan pelatihan guru PAUD di Desa Arjowilangun.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Arjowilangun pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dalam rangka mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan hakekat pemberdayaan yang diungkapkan Suhendra (2006:104), yaitu pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi kuasa dan kemampuan kepada masyarakat. Pemberian kuasa kepada masyarakat salahsatunya adalah kuasa untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas secara bebas. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Arjowilangun dalam pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015

tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, bahwa selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

a. Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

1) Peraturan yang Jelas

Peraturan atau regulasi merupakan acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan, termasuk peraturan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Arjowilangun juga membutuhkan adanya suatu peraturan atau regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, akan memudahkan Pemerintah Desa Arjowilangun dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya peraturan atau regulasi tersebut, akan memudahkan Pemerintah Desa Arjowilangun dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Kepala Desa Arjowilangun dalam wawancara sebelumnya, menyatakan bahwa Pemerintah Desa Arjowilangun dalam

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengacu secara umum pada peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan secara khusus pada Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

2) Fasilitas/Sarana-Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dibutuhkan fasilitas atau sarana-prasarana yang memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun didukung dengan fasilitas atau sarana-prasarana berupa bangunan kantor desa yang sudah memadai dan inventaris kantor yang sudah memadai pula seperti komputer, *printer*, dan fasilitas lainnya yang menunjang pelaksanaan pemerintahan desa.

Fasilitas berupa inventaris kantor merupakan salah satu hal yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), fasilitas atau

sarana-prasarana yang memadai juga mendukung Pemerintah Desa Arjowilangun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat desa. Fasilitas atau sarana-prasarana yang memadai, diperlukan perawatan dan perbaikan yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia, dalam hal ini adalah aparatur atau Perangkat Desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Kemampuan aparatur atau Perangkat Desa berkaitan dengan penyelesaian tugas-tugas administrasi, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahap perencanaan, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan.

Berdasarkan pernyataan Sekretaris Desa Arjowilangun dalam wawancara sebelumnya, penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan desa adalah Perangkat Desa yang masih kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, yang dikarenakan Perangkat Desa berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda yang berpengaruh terhadap kemampuannya dalam pelaksanaan

pemerintahan desa. Selain Perangkat Desa, Sumber Daya Manusia yang menghambat dalam pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun adalah pendamping desa yang pasif dalam mendampingi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Arjowilangun. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan adanya pelatihan dan pengembangan Perangkat Desa dan pendamping desa.

2) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Penyusunan laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kepala Desa dan pemerintahan di atasnya. Pembuatan laporan pertanggungjawaban di Desa Arjowilangun menjadi penghambat dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena dapat menghambat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun yang akan datang. Hal tersebut disebabkan oleh penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu oleh para pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti PKK, Karangtaruna dan lembaga desa lainnya. Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu

akan menghambat penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Arjowilangun. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan untuk Desa Arjowilangun pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 531.259.000,- (*lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*), yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Arjowilangun dalam tiga bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa bertindak sebagai Ketua Pelaksana sekaligus penanggungjawab.
2. Rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun telah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan yang diawali dengan kegiatan Musrenbangdes serta penyusunan RKPDDes dan APBDes, pencairan dan penyaluran yang dilakukan dua tahap pencairan yang kemudian disalurkan kepada masing-masing pelaksana kegiatan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan waktu dan

rencana kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Camat, serta Inspektorat yang berwenang, serta diakhiri dengan pertanggungjawaban dan pelaporan yang dilakukan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban.

3. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun selain untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, juga dialokasikan untuk kegiatan pembangunan desa berupa kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup, kegiatan pemeliharaan sarana-prasarana masyarakat, serta kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa. Selain itu, juga dialokasikan untuk pembinaan kemasayarakat berupa kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban, kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga, kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK, kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, serta untuk kegiatan PAUD.
4. Rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun didukung dengan adanya peraturan yang jelas yang menjadi acuan atau pedoman bagi Pemerintah Desa Arjowilangun dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) serta fasilitas atau sarana-prasarana yang memadai berupa kantor desa dan inventaris kantor yang dapat membantu Pemerintah Desa Arjowilangun dalam melaksanakan pemerintahan desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

5. Rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun juga mempunyai penghambat yaitu Sumber Daya Manusia berupa aparatur atau Perangkat Desa yang kurang mampu melaksanakan pekerjaannya dikarenakan latar belakang pendidikannya, serta Sumber Daya Manusia berupa pendamping desa yang pasif mendampingi desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arjowilangun. Selain itu, penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, berikut saran yang dapat dijadikan perbaikan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun:

1. Perlunya dilakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan, khususnya dalam penguasaan teknologi dan informasi, sehingga diharapkan Perangkat Desa dapat melek informasi dan tidak gagap teknologi.
2. Perlunya Pemerintah Desa dan pendamping desa untuk bekerjasama dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), terutama untuk pendamping desa yang bertugas untuk selalu aktif mengikuti dan mendampingi Pemerintah Desa dan lembaga yang melaksanakan kegiatan.

3. Perlunya sosialisasi terhadap pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) berkaitan dengan kedisiplinan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar tidak menjadi penghambat dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali.
- Baura, Juliska. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) (Suatu Studi di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)*. 1-9.
- Febriadmadja, Henariza. 2014. *Praktik Sosial dalam Alokasi Dana Desa untuk Program Pemberdayaan Masyarakat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.
- Karimah, Faizatul. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 2(4) : 597-602.
- Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016
- Maryunani. 2002. *Alokasi Dana Desa: Formulasi dan Implementasi*. Malang : UB Press.
- Miles, Mathew B. 2014. *Qualitative Data Analysis: a methods sourcebook*. Unites States of America.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Oleh, Helen Florensia. 2014. *Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*. *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 2(1) : 1-8.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Putra, Chandra Kusuma. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(6). 1203-1212.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2016 Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013-2019 Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Rozaki, Abdur, et al. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta : IRE Pres.

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Malang.

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.

Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.

Surjono, Agus. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing.

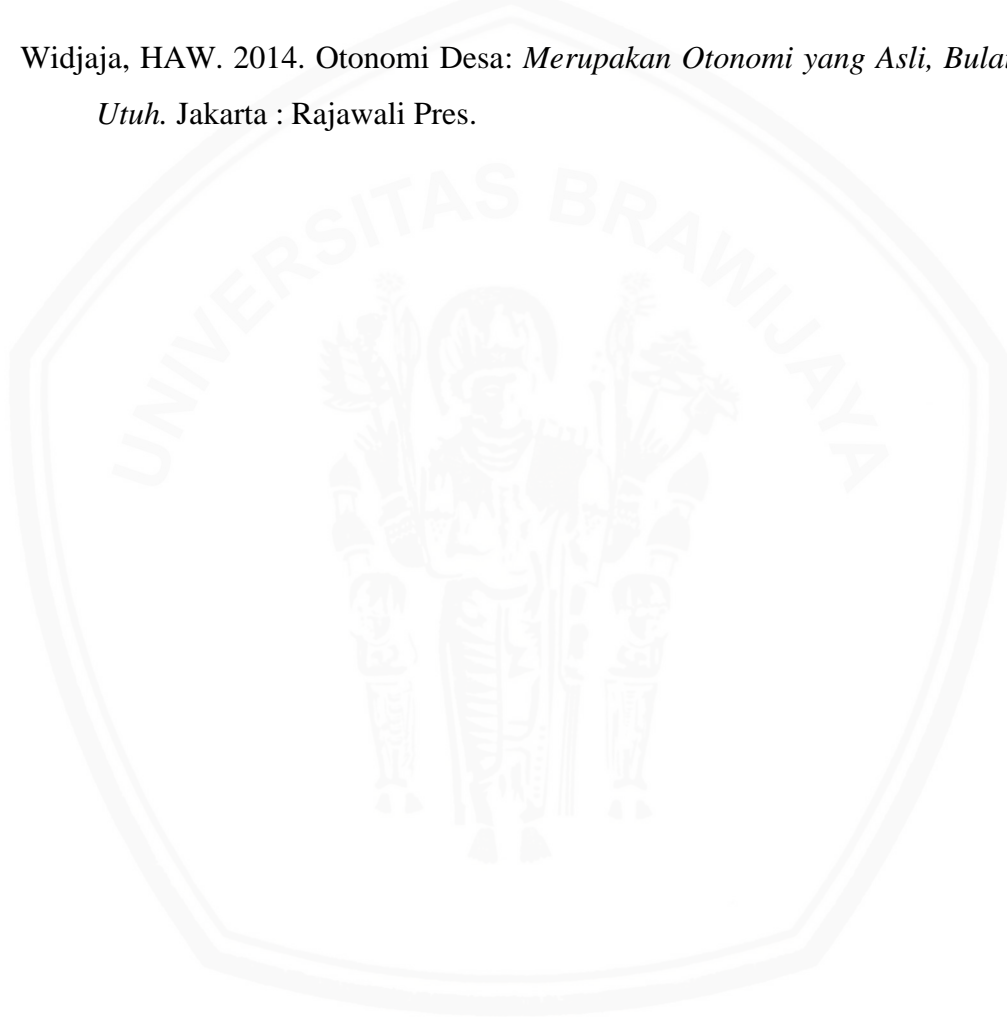
Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang : UB Press.

Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : Rajawali Pres.



LAMPIRAN

1. Surat Riset dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA
	FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
	Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 77 /UN10.F03.11.11/PN/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemerintah Kabupaten Malang
Jalan K.H. Agus Salim No. 7
Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey ke Kantor Desa Arjowilangun, Jl. Diponegoro No. 1, Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, bagi mahasiswa :

Nama : Dearista Mayashela

Alamat : Dusun Krajan 01, RT 03/RW 01 Putukrejo, Kec. Kalipare, Kab. Malang

NIM : 145030107111026

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

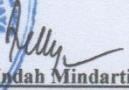
Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Tahun Anggaran 2016) (Studi Pada Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)

Lamanya : 2 (dua) bulan

Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Malang, 28 Desember 2017
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Tembusan:

1. Kantor Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

2. Surat Keterangan Melakukan Riset dari Bakesbangpol Kabupaten Malang

 **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG - 65119
SURAT KETERANGAN
NOMOR : 072/415 /35.07.207/2018
Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor: 77/UN10.F03.11.11/PN/2017 Tanggal: 28 Desember 2017 Perihal: Ijin Riset/Survey

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan **Ijin Riset/Survey** oleh:

Nama / Instansi : Dearista Mayashela

Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Tahun Anggaran 2016) (Studi pada Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)

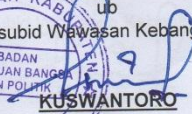
Daerah/tempat kegiatan : di Desa Arjowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang

Lamanya : 2 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 09 Februari 2018
An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang
up
Kasubid Wawasan Kebangsaan

KUSWANTORO
Penata
NIP.19680125 199203 1 004

Tembusan :
Yth.

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Camat Kalipre Kab. Malang
3. Kepala Desa Arjowilangun Kec. Kalipare Kab. Malang
4. Mhs/Ybs
5. Arsip

3. Pedoman Wawancara

- a. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa Arjowilangun (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa)
 - 1) Apakah Desa Arjowilangun menerima dana ADD pada tahun 2016?
 - 2) Berapakah besaran dana ADD yang diterima Desa Arjowilangun pada tahun 2016?
 - 3) Bagaimanakah mekanisme pengelolaan ADD di Desa Arjowilangun pada tahun 2016?
 - 4) Bagaimanakah tahap perencanaan pengelolaan ADD tahun 2016 di Desa Arjowilangun?
 - 5) Bagaimanakah tahap pencairan dan penyaluran ADD tahun 2016 di Desa Arjowilangun?
 - 6) Bagaimanakah tahap pelaksanaan ADD tahun 2016 di Desa Arjowilangun?
 - 7) Bagaimanakah tahap pengawasan dan pembinaan ADD tahun 2016 di Desa Arjowilangun?
 - 8) Bagaimanakah tahap pertanggungjawaban dan pelaporan ADD tahun 2016 di Desa Arjowilangun?
 - 9) Bagaimanakah bentuk realisasi ADD tahun 2016 di Desa Arjowilangun?
 - 10) Bagaimanakah bentuk kegiatan yang didanai ADD tahun 2016 di Desa Arjowilangun?
 - 11) Siapa sajakah yang terlibat dalam pengelolaan ADD di Desa Arjowilangun pada tahun 2016?
 - 12) Bagaimanakah peran lembaga desa dalam pengelolaan ADD di Desa Arjowilangun?
 - 13) Bagaimanakah peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD di Desa Arjowilangun?

- 14) Faktor apa sajakah yang mendukung pengelolaan ADD berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun?
- 15) Faktor apa sajakah yang menghambat pengelolaan ADD berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arjowilangun?

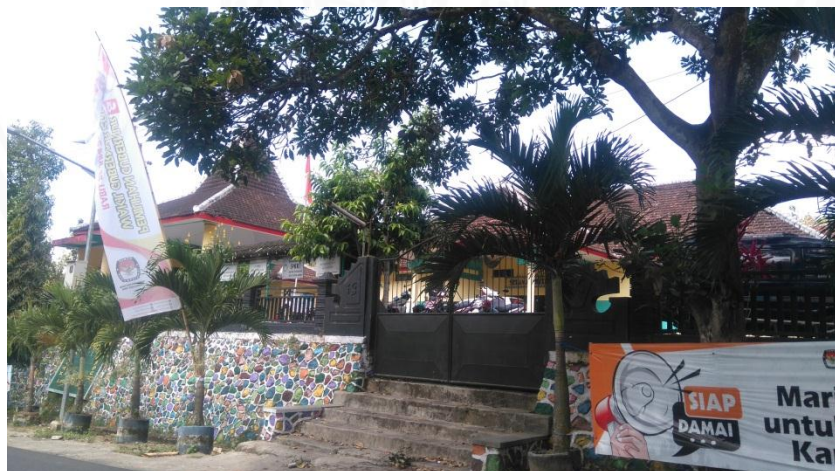
b. Pertanyaan untuk lembaga desa (PKK dan Karangtaruna)

- 1) Bagaimanakah keterlibatan lembaga desa dalam pengelolaan ADD tahun 2016 di Desa Arjowilangun?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan yang anda lakukan dalam mengalokasikan ADD tahun 2016 di Desa Arjowilangun?

c. Pertanyaan untuk masyarakat Desa Arjowilangun:

- 1) Bagaimanakah keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan ADD tahun 2016 di Desa Arjowilangun?

4. Dokumentasi Peneliti tentang Desa Arjowilangun



Keterangan: Kantor Desa Arjowilangun tampak dari jalan raya



Keterangan: Ruang Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa Arjowilangun



Keterangan: Ruang Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa di Kantor Desa Arjowilangun



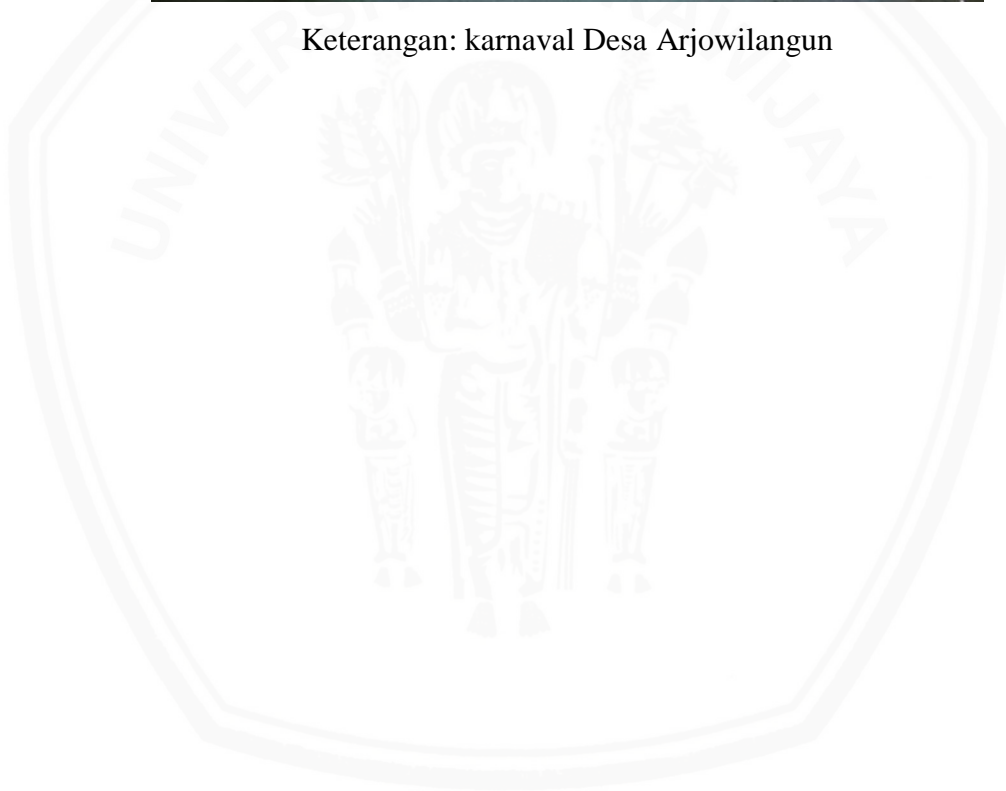
Keterangan: Iring-iringan leyang-leyong pada Bersih Desa Arjowilangun



Keterangan: Iring-iringan ogoh-ogoh pada Karnaval Desa Arjowilangun



Keterangan: karnaval Desa Arjowilangun



5. Dokumentasi Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes Tahun 2016 Desa Arjowilangun per Sumber Dana

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA ARJOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2016				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2016	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	531.259.000,00	531.259.000,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	531.259.000,00	531.259.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	531.259.000,00	531.259.000,00	0,00
2.	BELANJA			
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>335.032.500,00</u>	<u>335.032.500,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	212.472.000,00	212.472.000,00	0,00
2.1.1.1.	<u>Belanja Pegawai</u>	<u>212.472.000,00</u>	<u>212.472.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.472.000,00	41.472.000,00	0,00
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	76.758.500,00	76.758.500,00	0,00
2.1.2.2.	<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	<u>53.358.500,00</u>	<u>53.358.500,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.193.500,00	6.193.500,00	0,00
2.1.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	955.000,00	955.000,00	0,00
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Material	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00
2.1.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
2.1.2.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Pr	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.1.2.3.	<u>Belanja Modal</u>	<u>23.400.000,00</u>	<u>23.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	7.232.000,00	7.232.000,00	0,00
2.1.3.2.	<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	<u>7.232.000,00</u>	<u>7.232.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	232.000,00	232.000,00	0,00
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	31.730.000,00	31.730.000,00	0,00
2.1.4.2.	<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	<u>31.730.000,00</u>	<u>31.730.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00

Printed by SimKeu Desa 31/12/2016 10:12:36

Halaman 1

Keterangan: Laporan Realisasi APBDes 2016 per Sumber Dana (halaman 1)

Realisasi s.d 31/12/2016

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	31.730.000,00	31.730.000,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.730.000,00	31.730.000,00	0,00
2.1.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
2.1.4.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	680.000,00	680.000,00	0,00
2.1.4.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.1.7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	7.907.500,00	7.907.500,00	0,00
2.1.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.907.500,00	7.907.500,00	0,00
2.1.7.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	811.500,00	811.500,00	0,00
2.1.7.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	346.000,00	346.000,00	0,00
2.1.7.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.7.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.10	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa (API)	8.024.044,00	8.024.044,00	0,00
2.1.10.1.	Belanja Pegawai	1.184.044,00	1.184.044,00	0,00
2.1.10.1.11	Uang Lembur	1.184.044,00	1.184.044,00	0,00
2.1.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
2.1.10.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00
2.1.10.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.10.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.10.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	767.115.000,00	767.115.000,00	0,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	656.059.500,00	656.059.500,00	0,00
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.390.275,00	177.390.275,00	0,00
2.2.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.489.575,00	6.489.575,00	0,00
2.2.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.972.400,00	1.972.400,00	0,00
2.2.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	116.330.000,00	116.330.000,00	0,00
2.2.2.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	38.598.300,00	38.598.300,00	0,00
2.2.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.2.2.3.	Belanja Modal	478.669.225,00	478.669.225,00	0,00
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	478.669.225,00	478.669.225,00	0,00
2.2.9	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	9.243.000,00	9.243.000,00	0,00
2.2.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.243.000,00	9.243.000,00	0,00
2.2.9.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	243.000,00	243.000,00	0,00
2.2.9.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.9.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
2.2.11	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat	46.205.000,00	46.205.000,00	0,00
2.2.11.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.346.850,00	17.346.850,00	0,00
2.2.11.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000,00	25.000,00	0,00

Printed by Simd@ Desa 31/12/2016 10:04:01 Halaman 2

Keterangan: Laporan Realisasi APBDes 2016 per Sumber Dana (halaman 2)

Realisasi s.d 31/12/2016

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.11.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	121.850,00	121.850,00	0,00
2.2.11.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
2.2.11.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.11.3.	Belanja Modal	28.858.150,00	28.858.150,00	0,00
2.2.11.3.23	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sersejarah	28.858.150,00	28.858.150,00	0,00
2.2.14	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa	55.607.500,00	55.607.500,00	0,00
2.2.14.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.471.000,00	17.471.000,00	0,00
2.2.14.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	458.000,00	458.000,00	0,00
2.2.14.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	143.000,00	143.000,00	0,00
2.2.14.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00
2.2.14.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.14.3.	Belanja Modal	38.136.500,00	38.136.500,00	0,00
2.2.14.3.26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	38.136.500,00	38.136.500,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	85.171.000,00	85.171.000,00	0,00
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	11.603.000,00	11.603.000,00	0,00
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.603.000,00	11.603.000,00	0,00
2.3.1.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	103.000,00	103.000,00	0,00
2.3.1.2.5.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.1.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.1.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.3.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.3.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11.696.000,00	11.696.000,00	0,00
2.3.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.696.000,00	11.696.000,00	0,00
2.3.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	596.000,00	596.000,00	0,00
2.3.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.3.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.3.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	27.022.000,00	27.022.000,00	0,00
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.022.000,00	27.022.000,00	0,00
2.3.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	622.000,00	622.000,00	0,00
2.3.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
2.3.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.3.5	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00
2.3.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00
2.3.5.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
2.3.5.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

Printed by Santiaj Desa 31/12/2016 10:04:02

Halaman 3

Keterangan: Laporan Realisasi APBDes 2016 per Sumber Dana (halaman 3)